



## RAPIM KEMHAN 2017



KEBIJAKAN PERTAHANAN NEGARA  
TAHUN 2017

IMPLEMENTASI REVOLUSI MENTAL  
MELALUI PENDIDIKAN BELA NEGARA  
DALAM RANGKA MENUMBUHKAN  
KEMBANGKAN KETAHANAN  
EKONOMI

REVITALISASI PKBN  
DAN PANCASILA

PROFIL SATKER KEMHAN



ISSN 1693-0231



9 771693 023126

KEMENTERIAN PERTAHANAN  
REPUBLIK INDONESIA

JENDERAL SOEDIRMAN



# 64/48

JAN-FEB 2017



## DEWAN REDAKSI

### Pelindung/Penasihat:

Menteri Pertahanan  
Jenderal (Purn.) TNI Ryamizard Ryacudu

Sekjen Kemhan  
Laksdyia TNI Widodo, M.Sc

### Pemimpin Umum:

Kapuskom Publik Kemhan  
Brigjen TNI Djundan Eko Bintoro, M.Si(Han)

### Pemimpin Redaksi:

Kabid Kermainfo Puskompublik  
Kolonel Inf. Drs. Sylvester Albert Tumbol, M.A.

### Redaksi:

Letkol Arm. Joko Riyanto, S.Sos, M.Si.  
Pns Mutiara Silaen, S.Kom, M.AP.

### Desain Grafis:

Lettu Sus Farah Merila S, S.Kom.  
Pns Imam Rosyadi

### Foto:

Fotografer Puskom Publik Kemhan

### Percetakan & Sirkulasi:

Pns Nadia Maretti, S.Kom, M.M.

Diterbitkan oleh:  
Puskom Publik Kemhan  
Jl. Merdeka Barat 13-14, Jakarta  
Telp. 021-3829236



# Editorial

Para pembaca yang budiman,

Kami kembali menyapa para pembaca WIRA pada edisi pertama tahun 2017 ini dengan tampilan format baru.

Dalam Wira Edisi Januari-Februari 2017 ini, tim redaksi mengangkat tema yang berkaitan dengan kebijakan bidang pertahanan diantaranya Pelaksanaan Rapim Kemhan Tahun 2017, Kebijakan Pertahanan Negara 2017, Implementasi Revolusi Mental melalui Pendidikan Bela Negara dalam rangka menumbuhkembangkan Ketahanan Ekonomi, Revitalisasi PKBN dan Pancasila, serta Profil Satker Kementerian Pertahanan yaitu Pusat Keuangan, Pusat data dan Informasi, Pusat Komunikasi Publik dan Pusat Rehabilitasi.

Untuk memperkaya artikel majalah WIRA ini, kami senantiasa mengharapkan partisipasi pembaca untuk mengirimkan tulisan, baik berupa artikel, opini, informasi, tanggapan ataupun kritik dan saran, melalui email [redaksi.wira@kemhan.go.id](mailto:redaksi.wira@kemhan.go.id). Majalah WIRA juga dapat diakses dalam jaringan online di laman [www.kemhan.go.id](http://www.kemhan.go.id).

## 6

### RAPAT PIMPINAN (RAPIM) KEMENTERIAN PERTAHANAN TAHUN 2017



Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu saat membuka Rapim Kemhan hari kedua, Kamis, 12 Januari 2017, di kantor Kemhan, Jakarta, menyatakan bahwa pertahanan negara yang kuat harus ditopang dengan kebijakan yang tepat sebagai pedoman dan arah pembangunan pertahanan negara.

## 10

### KEBIJAKAN PERTAHANAN NEGARA TAHUN 2017



Kebijakan pertahanan negara diselenggarakan untuk mengelola seluruh sumber daya dan sarana prasarana nasional guna mencapai tujuan pertahanan negara dalam rangka mendukung pembangunan nasional.

## 32

### PROFIL SATKER

#### PUSAT KEUANGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN

#### PUSAT DATA DAN INFORMASI KEMENTERIAN PERTAHANAN

#### PUSAT KOMUNIKASI PUBLIK KEMENTERIAN PERTAHANAN

#### PUSAT REHABILITASI KEMENTERIAN PERTAHANAN

## 28

### REVITALISASI PKBN DAN PANCASILA

Melihat fakta-fakta yang menggambarkan bagaimana ancaman ideologis merasuk secara masif dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat kita, tentunya menggugah kehadiran negara untuk "kembali kepada ideologi Pancasila".

## 18

### IMPLEMENTASI REVOLUSI MENTAL MELALUI PENDIDIKAN BELA NEGARA DALAM RANGKA MENUMBUHKAN KEMBANGKAN KETAHANAN EKONOMI

Satu hal yang dapat mendukung terwujudnya ketahanan nasional melalui bela negara itu sendiri adalah berbuat yang terbaik melalui profesi dan kedudukan masing-masing warga negara apapun keahliannya untuk disumbangkan kepada kepentingan bangsa dan negara baik di bidang keamanan maupun kesejahteraan serta melaksanakan disiplin nasional dengan mematuhi segala peraturan dan perundangan negara, dan sesungguhnya inilah dimensi esensial dari Bela Negara.



## RAPAT PIMPINAN (RAPIM) KEMENTERIAN PERTAHANAN TAHUN 2017

Oleh:  
Tim Redaksi

Kegiatan Rapat Pimpinan (Rapim) Kementerian Pertahanan tahun 2017 merupakan kegiatan tahunan dalam rangka penyampaian kebijakan pertahanan negara tahun 2017, sebagai pedoman Kemhan dan TNI. Tema Rapim Kemhan Tahun 2017 adalah "Meningkatkan Semangat Bela Negara, Profesionalisme TNI dan Kemandirian Industri Pertahanan Didukung Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dalam Rangka Mewujudkan Pertahanan Negara yang Tangguh". Tema ini mengajak kita untuk terus membangun pertahanan negara yang tangguh melalui semangat bela negara, profesionalisme TNI dan kemandirian industri pertahanan dan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih.

Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu saat membuka Rapim

Kemhan hari kedua, Kamis, 12 Januari 2017, di kantor Kemhan, Jakarta, menyatakan bahwa pertahanan negara yang kuat harus ditopang dengan kebijakan yang tepat sebagai pedoman dan arah pembangunan pertahanan negara. Kebijakan ini menjadi acuan bagi semua dalam penyelenggaraan pertahanan negara. Implementasi kebijakan akan tepat sasaran apabila didasarkan pada kebijakan yang baik.

Pertahanan negara diselenggarakan untuk menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), serta keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman. Dalam menghadapi ancaman tersebut selain bertumpu pada profesionalitas TNI dan Alutsista yang didukung

dengan industri pertahanan, juga perlu melibatkan rakyat yang memiliki nilai-nilai bela negara melalui Pembinaan Kesadaran Bela Negara (PKBN).

Salah satu hal penting dalam penyelenggaraan pertahanan negara adalah mempersiapkan kekuatan rakyat yaitu dengan mengedepankan kekuatan rakyat dengan semangat kesadaran bela negara. Menhan mengatakan bahwa pada tahun 2017 berbagai kegiatan terkait program bela negara akan dilaksanakan. Diharapkan pengembangan kekuatan rakyat ini dapat memberikan efek daya gentar (*deterrent effect*) terhadap potensi ancaman di kawasan.

Tujuan utama dari bela Negara adalah agar setiap warga negara memiliki kesadaran sikap dan perilaku yang menjunjung tinggi

pentingnya aktualisasi nilai-nilai bela negara yaitu: cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, serta mempunyai kemampuan guna turut menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara serta sebagai bentuk revolusi mental dalam membangun daya tangkal bangsa menghadapi kompleksitas ancaman.

Menhan menekankan kepada jajaran Kemhan yang terkait program bela negara untuk dapat melakukan koordinasi dan pendekatan secara intensif dengan kementerian/lembaga lain untuk menggalakkan lagi program bela negara di kementerian/lembaga masing-masing. Sementara itu bagi

jajaran TNI, satuan-satuan TNI merupakan ujung tombak operasional di lapangan yang sangat dominan menentukan keberhasilan program ini. Oleh karena itu, Menhan berharap kepada jajaran TNI dan Angkatan untuk bersama-sama mendukung dan menyukseskan program bela negara. Tanpa kemanunggalan TNI dan Rakyat, niscaya TNI tidak akan dapat melaksanakan tugas pokok dalam menjaga kedaulatan, keselamatan bangsa dan keutuhan negara.

UUD 1945 mengamanatkan bahwa Indonesia ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Bangsa Indonesia juga menganut kebijakan politik luar negeri yang bebas aktif agar

tidak terjebak pada salah satu aliansi. Oleh karena itu, Kemhan selalu berkomitmen untuk menjalin kerjasama pertahanan yang kooperatif dan kolaboratif dengan negara-negara mitra strategis manapun yang memiliki kehendak baik bagi perdamaian dunia dan kestabilitas kawasan.

Enam butir penekanan Menhan yang perlu mendapat perhatian dalam rangka mendukung Kebijakan Pertahanan Negara Tahun 2017, sebagai berikut:

**Pertama**, pedoman Kebijakan Pertahanan Negara Tahun 2017 dalam penyusunan dan pelaksanaan program kerja Kemhan dan TNI tahun 2017 guna memenuhi Rencana Strategis Pertahanan Negara.





**Kedua**, cermati perkembangan lingkungan strategis di kawasan dan tingkatkan koordinasi serta sinergitas dengan segenap pemangku kepentingan dalam mewujudkan sistem pertahanan negara yang tangguh.

**Ketiga**, pedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pengelolaan sistem pertahanan negara.

**Keempat**, gunakan anggaran secara efisien, efektif, tertib administrasi Sistim Akuntansi Keuangan dan SIMAK BMN, serta hindari penyalahgunaan wewenang yang berpotensi melanggar hukum.

**Kelima**, tingkatkan solidaritas dan persatuhan antara Kemhan dan TNI dan laksanakan koordinasi untuk mencapai sinergitas dengan para pemangku kepentingan untuk mendukung kelancaran tugas.

**Keenam**, laksanakan pemeliharaan dan perawatan alutsista secara intensif dan benar sebagai bentuk pertanggung jawaban kepada rakyat dan untuk meminimalisir terjadinya kecelakaan, mari kita sadari bahwa Alutsista dapat diperbaiki dan dibeli tetapi nyawa Prajurit kita tidak dapat tergantikan oleh apapun.

Rapim Kemhan ini dihadiri oleh Panglima TNI, Kepala Staf Angkatan, Sekjen Kemhan, Irjen Kemhan, pejabat Eselon I dan II di lingkungan Kemhan serta sejumlah pejabat dari Mabes TNI, Mabes Angkatan dan KKIP. Hadir pula beberapa pejabat perwakilan dari Kementerian/Lembaga terkait.

Rapim Kemhan dilaksanakan selama 2 hari. Rapim hari pertama membahas refleksi pelaksanaan program kerja Kemhan T.A. 2016 dan proyeksi kegiatan 2017. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan, Laksda TNI Widodo, M.Si. menekankan kepada para pimpinan Satuan

Kerja Kementerian Pertahanan untuk berpegang pada tiga pilar kebijakan yaitu, membangun saling percaya, membangun kapasitas pertahanan dan mendorong kemandirian industri pertahanan Indonesia.

Sekjen Kemhan menegaskan bahwa Program bela negara selama ini telah menjadi ikon Kemhan. Program bela negara merupakan program pengaktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam pembangunan karakter SDM Pertahanan. Mulai tahun 2017 ini, program pendidikan bela negara akan menjadi materi pendidikan awal bagi mahasiswa baru di perguruan-perguruan tinggi. Oleh karena itu Kemhan harus menyiapkan berbagai perangkat baik personel maupun piranti lunak untuk mendukung program ini.

Mengenai industri pertahanan, Sekjen menekankan agar program penguatan industri pertahanan harus terus dilakukan untuk mewujudkan penggunaan Alutsista dalam negeri produk anak bangsa. Tentunya Kemhan akan terus mendorong agar produk-produk industri pertahanan dalam negeri memenuhi standar dan kualitas yang dibutuhkan TNI.

Program kerja haruslah merupakan jabaran dari rencana strategis Kemhan dan merupakan rangkaian program yang berkait dari tahun ke tahun. Hasil evaluasi pelaksanaan program kerja tahun

2016, menjadi pijakan dalam pelaksanaan program kerja tahun 2017. Refleksi program kerja Kemhan tahun 2016 haruslah berkesinambungan dengan proyeksi program kerja Kemhan tahun 2017 sehingga pembangunan sistem pertahanan negara yang diemban setiap satker/subsatker dapat berjalan dengan baik sesuai tugas dan fungsinya.

Daya serap anggaran Kemhan dan TNI tahun anggaran 2016 sampai dengan 28 Desember 2016 sebesar 84,89%. Pada periode yang sama di Tahun Anggaran 2015 sebesar 79%. Hal ini menunjukkan peningkatan yang berdampak pada percepatan pelaksanaan kegiatan. Agar program berhasil secara efektif dan efisien serta akuntabel, satuan kerja di Kemhan tidak hanya mencermati atau mengevaluasi aspek anggaran, tetapi juga memasukkan variabel akuntabilitas kebijakan publik.

Ditekankan juga tentang pentingnya loyalitas dan kebersamaan. Loyalitas sangat fundamental dalam sebuah lembaga, mengingat berbagai tantangan ke depan yang semakin dinamis dan kompleks. Loyalitas merupakan mesin dari sebuah organisasi. Tanpa loyalitas dan kebersamaan, maka penyelenggaraan organisasi khususnya di bidang pertahanan tidak akan berjalan dengan baik. Para pemangku kepentingan hendaknya sejalan memiliki loyalitas sesuai peran dan fungsinya. Outputnya dapat

terlihat dalam kebersamaan, tanpa mengedepankan ego sektoral masing-masing.

Pelaksanaan Rapat Pimpinan Kemhan ini merupakan langkah strategis untuk mengevaluasi pelaksanaan program kerja tahun anggaran 2016 serta menelaah prospek keberhasilan program kerja tahun anggaran 2017. Walaupun program kerja internal tetapi tentunya mempunyai keterkaitan dengan tugas-tugas instansi terkait lainnya di luar kementerian pertahanan terutama dengan Mabes TNI dan Mabes Angkatan. Diharapkan pelaksanaan Rapim Kemhan tahun 2017 akan memberikan energi positif bagi penyempurnaan sistem pertahanan negara.

Saat memimpin Rapim Kemhan Tahun 2017 hari pertama, Sekjen Kemhan didampingi oleh Irjen Kemhan Marsdyo TNI Hadi Tjahjanto dan Rektor Universitas Pertahanan Letjen TNI Dr I Wayan Midhio M.Phil. Rapim Kemhan RI tahun 2017 diikuti oleh para pejabat Eselon I dan II Kemhan serta jajaran pimpinan KKIP, Asabri dan YKPP.\*\*\*

# KEBIJAKAN PERTAHANAN NEGARA TAHUN 2017

## 1. UMUM

Kebijakan pertahanan negara diselenggarakan untuk mengelola seluruh sumber daya dan sarana prasarana nasional guna mencapai tujuan pertahanan negara dalam rangka mendukung pembangunan nasional. Membangun pertahanan negara dalam suatu sistem pengelolaan dan penyelenggaraan pertahanan negara, dilaksanakan secara komprehensif, sehingga diperlukan suatu kebijakan terhadap berbagai aspek terkait pertahanan negara. Kebijakan pertahanan negara bersifat fleksibel dan adaptif yang diwujudkan melalui arah dan sasaran kebijakan.

## 2. ARAH KEBIJAKAN

a. Melanjutkan pembangunan pertahanan negara yang konsisten terhadap Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan NKRI serta Bhineka Tunggal Ika dengan mengikuti kebijakan politik negara dalam bentuk peraturan perundang-undangan dengan menganut prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi.



b. Berpedoman pada visi, misi dan program prioritas Pemerintah, termasuk kebijakan poros maritim dunia yang didukung dengan penggunaan teknologi satelit dan sistem drone;

kebijakan umum dan kebijakan penyelenggaraan pertahanan negara tahun 2015-2019; dan rencana strategis pertahanan negara tahun 2015-2019.



c. Melanjutkan pembangunan Postur Pertahanan Militer yang diarahkan pada perwujudan MEF TNI, dengan tetap mengacu pada konsep pengembangan postur ideal TNI yang

telah direncanakan dalam jangka panjang, meliputi modernisasi Alutsista, pemeliharaan dan perawatan, pengembangan organisasi dan pemenuhan sarana prasarana yang

didukung kemampuan industri pertahanan dan profesionalisme, serta peningkatan kesejahteraan.

d. Memantapkan kerjasama dengan negara-negara

sahabat guna diplomasi pertahanan sesuai peraturan perundang-undangan dalam kerangka pengembangan kemampuan (*capacity building*) dan meningkatkan peran aktif dalam *Peacekeeping Operation (PKO)* berupa pengerahan kekuatan TNI untuk tugas perdamaian dunia di bawah PBB.

- e. Mewujudkan industri pertahanan yang kuat, mandiri dan berdaya saing melalui peningkatan peran KKIP dalam merumuskan kebijakan nasional industri pertahanan.
- f. Mendukung pembangunan karakter bangsa dalam rangka revolusi mental melalui pembinaan kesadaran dan kemampuan bela negara guna mengembangkan nilai-nilai yang terkandung dalam bela negara.

### 3. SASARAN KEBIJAKAN

- a. Terbinanya potensi sumber daya manusia yang dapat menjamin ketersediaan komponen dan unsur pertahanan negara, pemanfaatan sumber daya alam dan buatan, serta sarana prasarana nasional melalui kerjasama dengan K/L, dan Pemda, serta komponen bangsa lainnya.
- b. Terwujudnya kebijakan-



kebijakan dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pertahanan negara dengan melakukan analisa perkembangan lingkungan strategis untuk memperkirakan hakikat ancaman guna mendukung pembangunan poros maritim dunia.

c. Terselenggaranya pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU), Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (Perpres), Per-

turan Menteri Pertahanan (Permenhan), dan ketentuan pelaksanaan lainnya untuk kepentingan penyelenggaraan pertahanan negara, serta RUU kumulatif terbuka tentang pengesahan perjanjian internasional bidang pertahanan.

d. Terwujudnya penataan organisasi meliputi kelanjutan pembentukan instansi vertikal dan satuan-satuan TNI baik terpusat maupun



kewilayahan dengan memperhatikan struktur piramida TNI, pembinaan karier bagi prajurit dan PNS, pembinaan hukum serta peningkatan tata kelola aset dan anggaran yang efektif.

e. Terwujudnya pembangunan intelijen pertahanan negara melalui pembentukan Badan Intelijen Pertahanan (BIP) serta sistem jaringan intelijen dan sistem informasi yang akurat, terkini dan

real time secara terintegrasi guna pertukaran informasi antar institusi intelijen baik dalam negeri maupun luar negeri.

f. Terwujudnya pembinaan sistem informasi pertahanan negara (Sisinfohanneg) berbasis pertahanan siber melalui pengadaan satelit komunikasi pertahanan yang mandiri, terpenuhinya informasi publik bidang pertahanan negara dan peningkatan

profesionalisme SDM bersama sarana prasarana pendukungnya.

g. Terwujudnya akuntabilitas pengelolaan anggaran melalui pola pengawasan *pre audit*, *current audit*, *post audit* untuk mencapai opini penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), meningkatkan penerapan Sistem Pengendalian Internal (SPI), penguatan Reformasi Birokrasi, dan

percepatan realisasi Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK).

h. Terwujudnya kemampuan pertahanan negara yang handal dalam menghadapi ancaman nyata dan belum nyata serta pembangunan poros maritim dunia melalui: pemenuhan MEF TNI yang didukung oleh industri pertahanan yang kuat, mandiri dan berdaya saing; peningkatan kemampuan mobilitas berupa alat angkut berat dan daya tempur TNI serta; penyiapan pasukan siaga terutama

untuk penanganan bencana alam, bantuan kemanusiaan, pengamanan wilayah perbatasan, dan untuk tugas-tugas misi pemeliharaan perdamaian dunia serta keadaan darurat lainnya.

i. Terselenggaranya peningkatan pembangunan wilayah perbatasan melalui penanganan garis batas dan pengamanan wilayah berupa konsep sabuk pengamanan (*security belt*) secara terpadu, serta terwujudnya sinergitas antar pemangku kepentingan melalui

koordinasi dan kerja sama dalam peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pengamanan wilayah di perbatasan darat Kalimantan berupa Jalur Inspeksi Patroli Perbatasan (JIPP) dan Jalur Administrasi (JA), di perbatasan darat Papua berupa jalur penghubung (JP) dan Jalur Logistik (JL) dan di perbatasan darat Nusa Tenggara Timur berupa sarana prasarana/infra struktur pendukung pengamanan perbatasan. Disamping itu juga dilaksanakan kegiatan peningkatan pengelolaan ter-





- hadap pulau-pulau kecil terluar/terdepan dengan prioritas wilayah Kepulauan Natuna, Merauke, Saumlaki /Selaru, Biak dan Morotai.
- j. Terselenggaranya pengawasan dan pengamanan terhadap seluruh objek vital nasional yang bersifat strategis terhadap berbagai ancaman.
- k. Terlaksananya peningkatan pengerahan kekuatan laut dan kekuatan udara dalam upaya penegakan hukum dan penindakan berbagai kegiatan *illegal* di laut termasuk pelanggaran wilayah perbatasan laut di

- wilayah yurisdiksi nasional, dan terselenggaranya pembinaan potensi maritim di pulau-pulau kecil terluar/terdepan dalam rangka pembangunan poros maritim dunia.
- l. Terlaksananya peningkatan pengerahan kekuatan darat dan kekuatan udara dalam upaya menjagaan di daerah perbatasan darat dan pulau-pulau kecil terluar/terdepan di wilayah yurisdiksi nasional dalam rangka pencegahan pelanggaran wilayah daratan, serta terselenggaranya pembinaan teritorial.
- m. Terlaksananya peningkatan pengerahan kekuatan udara berupa patroli pengamanan wilayah udara nasional dalam upaya pengawasan dan menjagaan serta penegakan hukum di udara wilayah yurisdiksi nasional dalam rangka pembangunan poros maritim dunia, mendorong K/L terkait dalam mempercepat penataan kembali *Flight Information Region (FIR)*, dan terselenggaranya pembinaan potensi dirgantara.
- n. Terwujudnya gelar kekuatan pertahanan militer secara proporsional di-



seluruh wilayah NKRI guna pengamanan dan pengawasan wilayah yurisdiksi melalui gelar kekuatan terpusat dan kewilayahan secara sinergis dan terintegrasi dalam rangka pembangunan po-ros maritim dunia.

o. Terwujudnya kerjasama internasional secara bilateral maupun multilateral dalam rangka *Confidence Building Measure* dan memperkuat jati diri sebagai negara kepulauan dan negara maritim dengan mengacu pada kebijakan politik luar negeri yang bebas aktif, serta mengatasi isu-isu keamanan bersama melalui dialog pertahanan dan kemitraan strategis

- dengan negara-negara sahabat.
- p. Terlaksananya peningkatan pengiriman pasukan yang profesional didukung dengan perlengkapan serta sarana prasarana yang memadai dalam kegiatan misi pemeliharaan perdamaian dunia sesuai kebutuhan dan permintaan PBB sebagai upaya memenuhi target pengiriman 4.000 (empat ribu) *peacekeepers*.
- q. Terselenggaranya pemanfaatan Pusat Keamanan dan Perdamaian Indonesia dalam menyiapkan pasukan pemeliharaan perdamaian baik dalam maupun luar negeri.
- r. Terselenggaranya diplomasi pertahanan melalui dialog pertahanan strategis, dialog keamanan, dan kemitraan strategis dengan negara-negara sahabat dan tertatanya mekanisme fungsi Atase Pertahanan yang merupakan unsur TNI guna menjalankan diplomasi pertahanan untuk kepentingan Kementerian Pertahanan dan kepentingan TNI pada Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- s. Peningkatan pembinaan Industri Pertahanan secara terintegrasi dengan memperhatikan pe-



ngamanan teknologi melalui program K/L dalam lingkup Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP), meningkatkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta transfer teknologi dalam pengadaan Alat Utama Sistem Senjata

u. Terwujudnya peningkatan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi,



(Alutsista)/Alpalhan dalam rangka membangun kapabilitas pertahanan.

t. Terselenggaranya pengembangan sarana prasarana/*infra structure* guna mewujudkan kemandirian industri pertahanan dalam negeri untuk meningkatkan kemampuan kerja sama dan pengembangan produk baru serta pemeliharaan Alpalhan dalam rangka membangun kapabilitas pertahanan.

melalui penelitian dan pengembangan serta inovasi teknologi Alpalhan dengan melibatkan pengguna, lembaga penelitian dan pengembangan, perguruan tinggi, dan industri pertahanan nasional yang diimplementasikan dalam program strategis antara lain: rancang bangun sistem *drone*, melanjutkan pembuatan jet tempur KF-X/IF-X, pembangunan kapal selam, pembangunan industri propelan, pema-

ngunan roket nasional, pembangunan rudal nasional, pembangunan radar nasional, dan pembuatan tank sedang.

v. Terwujudnya Pembinaan Kesadaran Bela Negara (PKBN) melalui sosialisasi, pendidikan dan latihan serta kerja sama antara Kementerian Pertahanan, K/L, Pemda, dan komponen bangsa lainnya dalam menyelenggarakan program pembentukan kader bela negara di lingkungan pemukiman, pendidikan dan pekerjaan dalam upaya pencapaian target pembentukan kader Bela Negara.\*\*\*



**Kuliah Umum  
MENTERI PERTAHANAN RI  
Jenderal TNI (Purn)  
Bpk. RYAMIZARD RYACUDU**  
Bersama Mahasiswa se-Sumatera Barat  
di Universitas Negeri Padang

Minggu, 18 Desember 2016

# IMPLEMENTASI REVOLUSI MENTAL MELALUI PENDIDIKAN BELA NEGARA DALAM RANGKA MENUMBUHKAN KEMBANGKAN KETAHANAN EKONOMI

Oleh:

**Mayjen TNI Hartind Asrin, M.I.Kom**

Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Pertahanan

## LATAR BELAKANG

Institusi pendidikan memiliki peran penting dalam berbagai perubahan sosial sebuah Negara. Kontribusi ini tampak dalam beragam tradisi pendidikan, mulai dari politik, ekonomi, sosial kebudayaan bahkan nilai-nilai kebangsaan. Terkait tradisi mendidik komponen-komponen bangsa dari kalangan sipil dan militer, Badiklat Kementerian Pertahanan secara historis telah menjadi pelaku utama yang hingga saat ini masih konsisten dalam perannya. Namun demikian, Badiklat Kemhan tidak dapat dengan serta merta disamakan dengan lembaga-lembaga pendidikan militer pada

umumnya. Kekhasan institusi Badiklat Kemhan boleh jadi karena nilai-nilai yang menjadi kaidah kehidupan sehari-hari lembaga ini telah menjadi semacam dogma yang kuat namun fleksibel sehingga *relative* dapat beradaptasi menerima perubahan.

Salah satu faktor yang mendorong institusi Badiklat Kemhan untuk beradaptasi menerima perubahan adalah globalisasi. Beragam pandangan pakar mengenai globalisasi pada intinya memperdebatkan dua hal, yang pertama adalah bahwa globalisasi itu mendorong Negara-Negara bangsa ke arah homogenisasi dan tanpa sekat

sehingga seakan menyempit menjadi *global village*, dan yang kedua adalah berkurangnya otoritas Negara atas kedaulatan wilayah *territorialnya* dan kedaulatan ekonomi.

Pesan moral yang paling penting dalam merespon globalisme ini sebenarnya bukan pada tataran setuju atau tidak setuju, tetapi lebih pada bagaimana mempersiapkan segenap warga Negara untuk menghadapi globalisasi ini tanpa harus menggadaikan kedaulatan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan *territorial* dalam konteks pertahanan keamanan. Kementerian Pertahanan (Kemhan) adalah instansi pemerintah



yang bertanggung jawab dibidang penyelenggaraan Pertahanan Negara. Oleh karena itu Kemhan bertugas untuk menyiapkan rumusan Kebijakan Umum Pertahanan Negara dan menetapkan Kebijakan Penyelegaraan Pertahanan Negara.

Salah satu tantangan yang dihadapi oleh Kementerian Pertahanan saat ini dan 10 tahun ke depan adalah perlunya meningkatkan kesadaran bela Negara bagi setiap warga Negara, melalui pendidikan dan latihan bela Negara sambil secara pararel membahas dalam Program legislasi nasional DPR tahun 2015-2019 utamanya mengenai rancangan Undang-Undang

Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Pertahanan. Kita yakin disahkannya RUU tentang pengelolaan Sumber Daya Nasional Pertahanan menjadi undang-undang hanyalah soal waktu, karena hal bela negara memang telah diamanatkan oleh UUD 1945 pada pasal 27 ayat 3, bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.

Hal tersebut mengandung pemahaman bahwa dalam penyelenggaraan pertahanan negara Kementerian Pertahanan akan mengawal setiap warga negara dalam menggunakan hak dan kewajiban untuk ikut serta dalam upaya pembelaan Negara.

Bentuknya adalah melalui gelar pendidikan dan pelatihan kader bela negara secara nasional yang saat ini sudah sangat penting pelaksanaannya, terlebih di era ekonomi global dimana kedaulatan ekonomi negara semakin kecil seiring melemahnya komitmen masyarakat terhadap Pancasila sebagai nilai-nilai kebangsaan yang telah lama menjadi prinsip dan bahkan sebagai pandangan hidup. Bahwa pendidikan merupakan proses penyadaran (konsientisasi), atau kegiatan membangkitkan kesadaran manusia akan semua hal yang ia miliki, yaitu potensi intelektual, emosional dan

perilaku. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran itu yang secara potensial ada dalam diri kita sejak lahir sebagai suatu daya, sama halnya dengan daya-tahu, daya rasa, harus ditumbuh-kembangkan dalam kehidupan selanjutnya, agar menjadi suatu kesanggupan aktual. Proses penumbuh-kembangan itu berlangsung dalam proses pendidikan, melalui pengajaran, teladan hidup, bimbingan-penyuluhan.

Dalam konteks pendidikan kesadaran bela negara, pertanyaan yang mengemuka adalah

kesadaran apa yang hendak dibangun? Jawabannya adalah kesadaran warga negara akan adanya ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan, baik dari dalam maupun dari luar negeri, terhadap Negara: kedaulatannya, keutuhan wilayahnya, dan keselamatan segenap rakyatnya.

### **REVOLUSI MENTAL DALAM DESAIN NILAI-NILAI KEBANGSAAN**

Satu hal yang dapat mendukung terwujudnya ketahanan nasional melalui bela negara itu sendiri adalah berbuat yang terbaik melalui profesi dan kedudukan masing-masing warga negara apapun keahliannya untuk disumbangkan kepada kepentingan bangsa dan negara baik di bidang keamanan maupun kesejahteraan serta melaksanakan disiplin nasional dengan mematuhi segala peraturan dan perundangan negara, dan sesungguhnya inilah dimensi esensial dari Bela Negara. Revolusi Mental cukup menguras energi dari berbagai pihak, utamanya terkait dengan dis-

torsi nilai-nilai kebangsaan. Melalui diskusi yang hangat dan dengan mengacu pada Pancasila dan Trisakti, maka disepakati bahwa nilai yang paling penting dikembangkan dalam Revolusi Mental berjumlah enam yaitu:

1. Kewargaan. Nilai ini sangat perlu dikembangkan agar orang Indonesia tidak merasa hanya sebagai penduduk tetapi warga negara yang punya kesadaran yang seimbang antara hak dan kewajiban.
2. Bisa Dipercaya. Inilah nilai yang mulai terbengkalai dan terabaikan di masyarakat kita. Perlu ditimbulkan kembali diberbagai aspek keidupan.
3. Kemandirian. Nilai kemandirian perlu dibangun kembali, bukan hanya oleh masyarakat tetapi terutama Pemerintah untuk memfasilitasinya melalui pemberian kebijakan pembangunan dan regulasi yang mendorong kemandirian.
4. Kreativitas. Kita harus menyadari bahwa sumber daya alam terbatas, tetapi kreativitas tidak. Dengan Revolusi Mental kita harus membangkitkan kreativitas bangsa kita sampai pada titik





yang membanggakan secara internasional.

5. Gotong Royong. Revolusi Mental harus mengembalikan karakter gotong-royong bangsa ini pada tingkat komunitas sampai ke sistem politik dan ekonomi yang lebih makro dalam bentuk yang lebih modern.
6. Saling Menghargai. Sebagai bangsa majemuk, kelangsungan hidup Indonesia sangat bergantung pada nilai ini. Revolusi Mental harus mampu mengembalikan karakter bangsa kita yang dikenal bertenggang rasa dan bersahabat ini.

Muara dari lemahnya komitmen terhadap nilai-nilai kebangsaan adalah distorsi nasionalisme. Dalam tataran konsep, dinarasikan bahwa nilai-nilai kebangsaan adalah nilai yang melekat pada diri setiap warga negara atau norma-norma kebaikan yang terkandung dan menjadi ciri kepribadian bangsa Indonesia yang bersumber dari nilai-nilai Pancasila, Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika yang dicerminkan dari sikap dan perilaku setiap warga negara sebagai bangsa Indonesia yang senantiasa mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa

serta kesatuan wilayah dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, tanpa mengesampingkan tanggung jawab untuk menghargai bangsa dan negara lain.

Bagi bangsa Indonesia yang beradab, kedaulatan (sovereignty) tidak hanya mengandung "privilege" berupa jurisdiksi untuk mengatur, menegakkan hukum dan mengadili segala hal yang berada dalam wilayah negara, tetapi juga mengandung tanggungjawab (responsibility) untuk menghormati nilai-nilai kemanusiaan atas dasar norma, nilai dan standar universal dan menghormati pula Negara lain untuk dapat

# KULIAH UMUM

OLEH MENTERI PERTAHANAN RI JENDERAL TNI (PUR)  
KEPADА CIVITAS AKADEMIKA UNIVERSITAS PA



menjamin kesejahteraan serta keamanan nasional, regional dan internasional.

Lemahnya komitmen terhadap nilai-nilai kebangsaan yang justru merupakan nilai-nilai strategis sebagaimana teridentifikasi di atas adalah masalah kebangsaan yang sangat serius karena mengarah pada distorsi nasionalisme. Dalam konteks ini kita dapat melihat ada dua faktor penyebabnya, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal, berupa pengaruh globalisasi yang disemangati liberalisme mendorong lahirnya sistem kapitalisme di bidang ekonomi dan demokrasi liberal di bidang politik. Faktor internal, yaitu bersumber dari internal bangsa Indonesia sendiri. Kenyataan seperti ini muncul dari kesalahan

sebagian masyarakat dalam memahami Pancasila. Secara konseptual Bela Negara di latar belakangi oleh:

1. Tekad, sikap dan tindakan warga negara yang teratur, menyeluruh, terpadu dan berlanjut,
2. Dilandasi oleh kecintaan pada tanah air,
3. Kesadaran berbangsa dan bernegara Indonesia,
4. Keyakinan akan kesaktian Pancasila sebagai ideologi negara,
5. Kerelaan untuk berkorban guna meniadakan setiap ancaman baik dari luar negeri maupun dari dalam negeri yang membahayakan

kemerdekaan dan kedaulatan negara, kesatuan dan persatuan bangsa, keutuhan wilayah dan yurisdiksi nasional, serta nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Lima (5) konsep di atas, merupakan bidang studi inti tataran dasar Bela Negara yang telah digelar oleh Badiklat Kementerian Pertahanan. Merujuk pada penjelasan pasal 9 Undang-undang No. 3 Tahun 2002, Bela Negara dapat didefinisikan sebagai sikap dan perilaku warga Negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan Negara.

## BELA NEGARA RESPON ANTITESA HANCURNYA NEGARA BANGSA

Salah satu cara untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang telah tereduksinya kedaulatan atau bahkan hilangnya kedaulatan territorial akibat perkembangan globalisasi perekonomian dunia tersebut menurut Kenichi Ohmae dalam *The End of The Nation State* (hancurnya Negara bangsa) adalah dengan mengamati pengaruh dari apa yang disebut 4 "I" yang menentukan.

Pertama, investasi. Pasar modal di sebagian besar negara maju adalah sama dengan kelebihan dana untuk investasi. Karena itulah, pasar-pasar modal dikembangkan sebagai sebuah varietas mekanisme yang luas

untuk memindahkan trilyunan dana simpanan itu melampaui batas-batas nasional. Oleh karena itu, investasi "I" pertama tidak lagi dibatasi secara geografis. Kini, di mana pun kita tinggal di dunia, kesempatan itu ada, sangat menarik, dan uang akan terus masuk.

Kedua, Industri. Industri juga jauh lebih global dalam orientasi sekarang ketimbang orientasinya satu dasawarsa yang lalu. pada masa lalu, kepentingan dari pemerintahan jelas menjadi persoalan. Perusahaan harus melakukan banyak kesepakatan dengan banyak pemerintah untuk memasarkan berbagai sumber daya dan keterampilan untuk ditukarkan agar bisa memperoleh akses istimewa ke pasar-pasar lokal.

Gerakan investasi dan industri telah lama difasilitasi oleh "I" yang ketiga, Teknologi Informasi. Teknologi Informasi hingga kini memungkinkan sebuah perusahaan untuk beroperasi di berbagai belahan dunia tanpa harus membangun seluruh sistem bisnis di tiap-tiap Negara di mana ia memiliki perwakilan. Para insinyur di suatu Negara dapat dengan mudah mengontrol operasi-operasi penanaman di bagian wilayah Negara lain. Para perancang produk di suatu Negara bisa mengontrol berbagai aktivitas sebuah jaringan perusahaan di Negara lain.

Akhirnya, "I" keempat, Individual. Para konsumen individual juga telah memiliki orientasi lebih global. Dengan akses informasi yang lebih baik mengenai gaya hidup di



seluruh belahan dunia, keinginan membeli mereka tidak lagi dikondisikan oleh larangan-larangan pemerintah. Para konsumen semakin menginginkan produk-produk yang terbaik dan termurah, tidak masalah dari mana asalnya produk tersebut.

Secara bersamaan, mobilitas empat lini, sangat memungkinkan unit-unit ekonomi di banyak belahan dunia untuk mendapatkan apa pun yang dibutuhkan demi pembangunan. Oleh karena

pasar global berlaku untuk semuanya, maka keempat "I" itu bekerja sesuai dengan pasar mereka sendiri, negara bangsa tidak lagi harus memainkan peran sebagai pembuat pasar (*market making role*). Dari pemikiran Ohmae di atas, terlihat bahwa kecenderungan menurunnya peran Negara sebagai akibat proses globalisasi, Negara telah kehilangan ruh penentu kebijakan sentral bagi pelaku-pelaku ekonominya, termasuk di dalamnya kehilangan kemampuan untuk menjaga wilayah teritorialnya dari serbuan produk-produk asing. Pesan moral yang paling penting dalam merespon globalisme ini sebenarnya bukan pada

tataran setuju atau tidak setuju, tetapi lebih pada bagaimana mempersiapkan segenap warga negara untuk menghadapi ujud globalisasi ini tanpa harus menggadaikan kedaulatan *ideology*, politik, ekonomi, sosial budaya dan *territorial* dalam konteks pertahanan keamanan.

## KETERBUKAAN GLOBALISASI EKONOMI

Sudah menjadi fakta sejarah bahwa ketahanan sebuah negara akan menguat jika ia mempunyai ketahanan ekonomi yang kokoh. Begitupula sebaliknya, ketahanan sebuah negara akan rapuh jika ekonomi di negara itu melemah. Banyak negara yang tercerai berai-



Sumber: BeritaDaerah

karena diawali dengan ekonomi yang rapuh atau ketidakadilan dalam pembangunan. Dalam soal ekonomi, kini kita harus menghadapi kenyataan baru, yaitu keterbukaan globalisasi ekonomi. Kalau di zaman dahulu, ketika perekonomian suatu negara mengalami kekurangan, ia bisa melakukan penjajahan ke negara lain. Kini, sebaliknya, negara yang kesulitan sumber daya alam harus mampu mendatangkan sumber daya ekonomi (investasi asing) ke negaranya. Pararel dengan semangat kedaulatan ekonomi, dalam menghadapi keterbukaan ekonomi sejagat, maka menjadi sebuah keniscayaan ketika ruh ekonomi Pancasila harus menjadi

pedoman kebijakan ekonomi nasional.

Ekonomi Pancasila adalah sistem ekonomi yang berkemanusiaan, berkerakyatan, serta mendukung perwujudan persatuan Indonesia. Sistem ekonomi yang bertektonahan adalah ekonomi yang memperhatikan etika dan kepedulian sosial sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap Ketuhanan Yang Maha Esa. Sistem ekonomi yang berkemanusiaan adalah sistem ekonomi yang menjadikan manusia sebagai subjek, bukan sebagai objek apalagi sebagai komoditi, sebagaimana diamanatkan kemanusiaan yang adil dan

beradab. Sistem ekonomi yang berkerakyatan adalah sistem ekonomi yang bertumpu pada kesejahteraan rakyat banyak sebagaimana diamanatkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan/perwakilan. Sistem ekonomi yang berkeadilan adalah sistem ekonomi yang mampu memaksimalkan pemerataan. Suatu kenyataan bahwa di era globalisasi ini tidak mungkin sebuah negara mengisolasi dirinya dari negara lain. Setiap negara saling berhubungan dan tergantung dengan negara lain. Globalisasi mau tidak mau hanya bisa diterima. Namun demikian, sikap kritis terhadap dampak-dampak negatif yang ditimbulkan globalisasi perlu dilakukan.



Sikap yang tepat adalah bukan menjadi korban globalisasi, tetapi menjadi pelaku globalisasi. Nilai-nilai yang baik perlu diadopsi dan diadaptasikan dengan nilai-nilai adat, moral, dan agama bangsa Indonesia. Berhadapan dengan globalisasi, Thomas L. Friedman mengusulkan agar setiap negara mengenakan baju yang cocok yang disebutnya dengan *the golden straitjacket*. Untuk itu setiap negara perlu menerapkan prinsip-prinsip ekonomi berikut ini:

1. Menempatkan sektor swasta sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi.
2. Mempertahankan angka inflasi pada tingkat yang rendah.
3. Mempertahankan stabilitas harga barang dan jasa.
4. Mengurangi peran birokrasi.
5. Mempertahankan anggaran yang berimbang atau surplus.
6. Menghapus atau menuangkan segala tarif impor.
7. Menghapus segala hambatan investasi luar negeri.
8. Membebaskan segala bentuk kuota dan monopoli.
9. Meningkatkan ekspor.
10. Memprivatisasi usaha industri barang dan jasa.
11. Deregulasi ekonomi untuk



memberi peluang pada tumbuhnya kompetisi.

## 12. Pemberantasan korupsi di lingkungan birokrasi.

Dari berbagai komponen di atas dapat terlihat bahwa globalisasi dan identitas nasional suatu bangsa dapat berbanding lurus maupun berbanding terbalik tergantung bagaimana kesiapan bangsa untuk menghadapi. Ketika jati diri suatu bangsa telah kuat tertanam

pada segenap komponen anak bangsa, maka globalisasi akan menjadi keniscayaan yang dapat mengantar pada kejayaan bangsa. Fenomena inilah yang memperkuat asumsi tentang pentingnya gelar program bela negara Pemerintah melalui Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Bela Negara berisi semangat yang terpadu dari warga negara dalam menghadapi ancaman kedaulatan ideologi, politik, ekonomi, dan sosial budaya.

## KESIMPULAN

Lemahnya komitmen terhadap nilai-nilai kebangsaan yang justru merupakan nilai-nilai strategis sebagaimana teridentifikasi di atas, adalah masalah kebangsaan yang sangat serius karena mengarah pada distorsi nasionalisme. Kita dapat melihat ada dua faktor penyebabnya, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal, berupa pengaruh globalisasi yang disemangati liberalisme mendorong lahirnya sistem kapitalisme di bidang ekonomi dan demokrasi liberal di bidang politik. Faktor internal, yaitu bersumber dari internal bangsa Indonesia sendiri. Kenyataan seperti ini muncul dari kesalahan sebagian masyarakat dalam memahami Pancasila. Sebagian kalangan masyarakat memandang Pancasila tidak dapat mengatasi masalah krisis ekonomi, sosial, politik, budaya bahkan krisis yang berdimensi keamanan. Oleh karenanya, menjadi penting digelarnya pendidikan kesadaran bela negara untuk membekali setiap warga negara Indonesia dengan nilai-nilai kebangsaan dalam rangka membentuk karakter bangsa yang ulet dan tangguh.\*\*\*





(reformasi) politik dan hukum bukannya menunjukkan tendensi positif dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat. Malahan sebaliknya tendensi negatif menunjukkan terjadinya dekadensi moral (sosial budaya), ideologis, politik dan hukum di kalangan masyarakat luas, khususnya generasi muda. Hal ini bisa diamati dengan semakin masifnya pelibatan generasi muda di berbagai kasus narkoba, korupsi, terorisme, kriminalitas, dan tindak pidana lainnya.

## REVITALISASI PKBN DAN PANCASILA

Oleh :

**Letkol Inf Drs. Sabar Simatupang, M.Si**

Akademisi LP3M Universitas Pertahanan dan Alumnus Magister Manajemen Pertahanan KSKN UI

Di tengah maraknya terjadi indikasi reradikalisa (terorisme), liberalisasi, reinterpretasi ideologi komunisme, dekadensi moral dan rasa kebangsaan di kalangan generasi muda beberapa tahun terakhir ini, pemerintah kembali memperingati Hari Bela Negara pada tanggal 19 Desember tahun ini. Dalam konteks ini tawaran program Pembinaan Kesadaran Bela Negara (PKBN) yang diinisiasi oleh Menhan Ryamizard Ryacudu sejak awal tahun 2015 semakin menemukan relevansinya. Salah satu nilai dasar yang sangat fundamental dalam konsepsi Bela Negara tersebut adalah "yakin terhadap Pancasila sebagai ideologi Negara".

### IRONI ORDE REFORMASI

Semenjak lengsernya Presiden Suharto pada tahun 1998 (berarti berakhirknya pemerintahan Orde Baru), tampak muncul suatu ironi kecenderungan yang kontra produktif dengan ideawal gagasan Reformasi Total pemerintahan baru. Pemerintahan Orde Baru yang tadinya dianggap gagal mempertahankan eksistensi ideologi negara dan kesejahteraan masyarakat, akhirnya semua kebijakan politiknya (termasuk PKBN) ditolak oleh penggagas Orde Reformasi.

Ironisnya setelah 18 tahun Orde Reformasi sudah berjalan, faktanya pembaharuan

### ANCAMAN DAN TANTANGAN IDEOLOGIS

Bila kita memetakan secara ideologis kecenderungan pola pikir dan sikap masyarakat saat ini, maka ada beberapa ancaman yang semakin intensif terjadi. Pertama, ancaman reradikalisa nilai-nilai dasar keagamaan di kalangan generasi muda khususnya mahasiswa (lihat berbagai hasil penelitian yang dilakukan LIPI, UI, Balitbang diklat Kemenag). Fenomena ini sebenarnya mulai terjadi sekitar dekade 90-an sebagai sikap yang anti kemapanan terhadap kegiatan keagamaan mahasiswa yang sudah ada (seperti HMI, PMII, dan lain-lain). Aktifitas



sumber: oketekno.com

kemahasiswaan ini justru terlihat marak di kampus PT-PT negeri dan banyak diminati serta semakin merebak setelah pemerintahan Orde Baru.

Fenomena ini jelas sangat dikuatirkan dapat mempengaruhi sikap dan perilaku generasi penerus terutama anak-anak dan remaja (tingkat pendidikan dasar, menengah dan atas). Indikasi fenomena dan pengaruhnya antara lain dapat dilihat dari berbagai fakta keterlibatan beberapa mantan aktifis keagamaan kampus menjadi pelaku teror dan relawan pengikut ISIS, munculnya sikap intoleran antar ormas kemahasiswaan, memudarnya kesadaran ideologis Pancasila di

kalangan sebagian anak sekolah dan artis muda, kurangnya minat mahasiswa/pelajar terhadap aktifitas yang bertemakan nasionalisme/patriotisme, dan sebagainya.

Kedua, ancaman neoliberalisme sebagai "anti tesa" bagi tren deideologisasi Pancasila di kalangan masyarakat tertentu. Pesatnya kemajuan ilipengtek (modernisasi), selain dapat berdampak positif, dikuatirkan berimplikasi negatif bagi kalangan generasi muda. Indikasi maraknya dekadensi moral (kasus korupsi, penyalahgunaan narkoba, pornografi, penganiayaan) sebagai akibat (*side efect*) dari kemajuan teknologi informatika di kalangan pemimpin politik saat ini, ternyata

secara psikologis dapat berakibat fatal bagi alam pikir dan sikap generasi muda kita. Tantangan ideologis lainnya adalah peナfsiran sistemik terhadap praktek kepemerintahan / kemasyarakatan dikuatirkan semakin melenceng dari jiwa/roh Pancasila. Bahkan yang paling menguatirkan adalah bilamana upaya sebagian kelompok elite partai yang terus mewacanakan amandemen UUD 1945 tidak lagi berpijak pada dasar negara Pancasila.

Ketiga, meskipun hal ini dianggap "debatable" di kalangan penolak rezim Soeharto, sadar tidak sadar kecenderungan kembalinya (reideologisasi) Komunisme semakin kentara

dan bisa diamati. Sebagai alternatif bagi kecenderungan negatif dari dampak pengaruh neo-liberalisme, kemunculan pengaruh ideologi Komunisme mendapat tempat di kalangan kelompok masyarakat tertentu. Lihat saja misalnya jargon-jargon politik dan program “terselubung” yang diusung ormas-ormas tertentu dan “dibungkus” seolah-olah pro-kerakyatan/pejuang HAM, bisa jadi bias sebagai manifestasi Komunisme “gaya baru” (kasus pementasan dan diskusi budaya yang terpaksa dibubarkan Polisi di beberapa tempat, kasus demo buruh yang “anakhis”).

Ke empat, walaupun ancaman Fasisme/Totaliterisme dan Otoriterisme saat ini belum menimbulkan kondisi nyata pada kehidupan bernegara dan bermasyarakat, tetapi tanpa disadari bisa saja terjadi pada perilaku sebagian pemimpin politik negeri ini. (Lihat saja misalnya kecenderungan sikap politik para politisi muda yang selalu ingin berkuasa dan menarik-narik pihak militer untuk berpolitik, serta sememana terhadap rakyat dengan mengeksplorasi kepentingan oligarkinya). Fasisme pada dasarnya mendambakan negara yang kuat dengan pemerintahan

kekuasaan yang tunggal dan orientasi otoriterisme yang menyalahgunakan kekuatan militer.

## UPAYA REVITALISASI BELA NEGARA

Melihat fakta-fakta yang menggambarkan bagaimana ancaman ideologis masuk secara masif dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat kita, tentunya menggugah kehadiran negara untuk “kembali kepada ideologi Pancasila”. Ironisnya sejak Reformasi digulirkan pemerintah, kurikulum pendidikan nasional saat ini



nyatanya memang tidak lagi menyajikan mata pelajaran/kuliah Pancasila secara utuh dan dinamis. Program kegiatan intra dan ekstra kulikulerpun tidak lagi menunjukkan penjabaran pendidikan moral dan budi pekerti Pancasila.

Pesatnya perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi serta komunikasi, ternyata tanpa disadari membawa masuknya nilai-nilai ideologi luar (seperti Neo Liberalisme/Individualisme, Atheisme/No Religion, Federalisme, Fasisme/Totalitarianisme, Neo Marxisme/Sosialisme dengan berbagai variannya) yang mempengaruhi idealisme dan perilaku anak didik. Sementara penghayatan terhadap ideologi Pancasila yang sarat dengan nilai-nilai agama, budaya dan moralitas menjadi terkesampingkan akibat kemajuan tersebut.

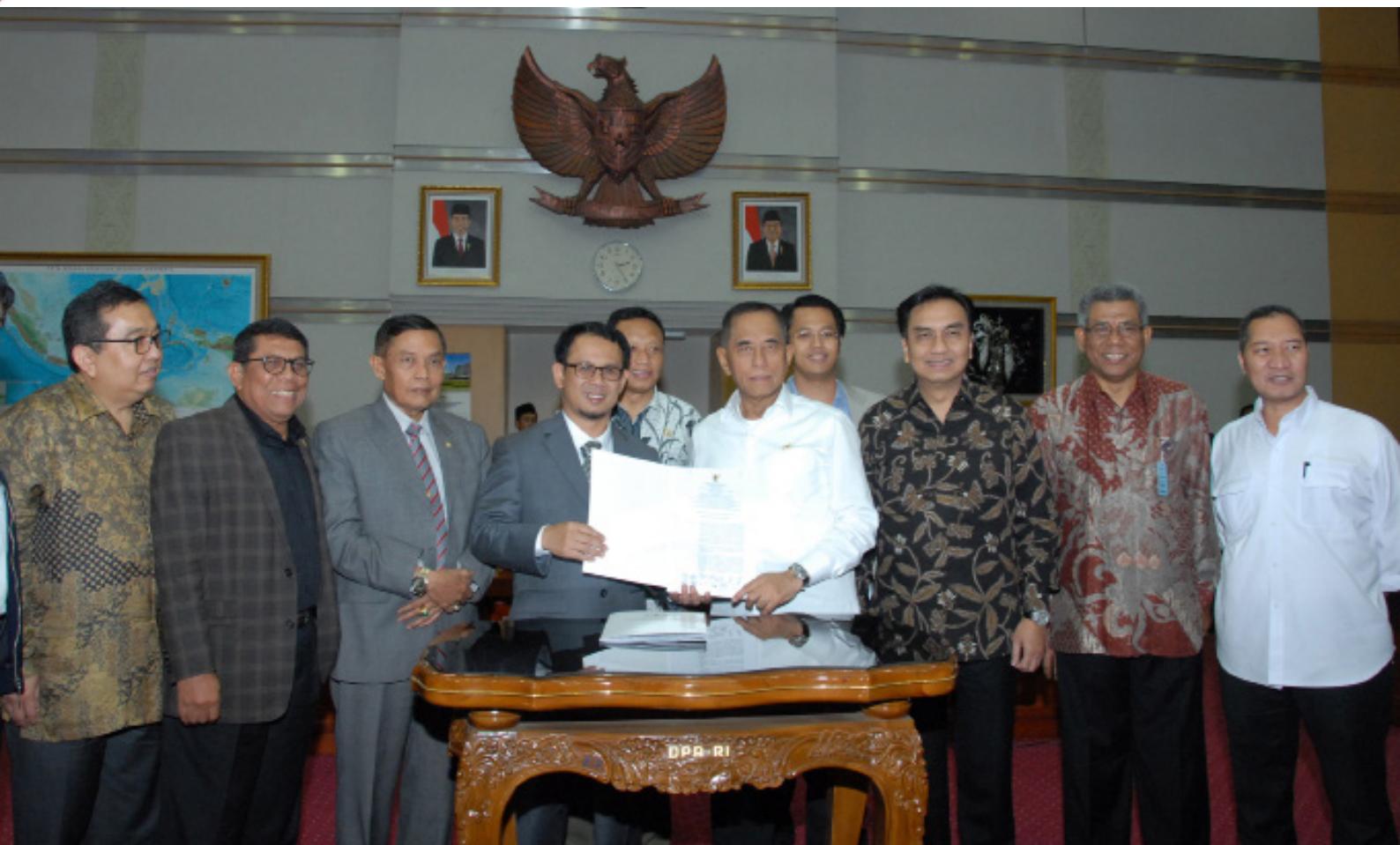
Penerimaan di sebagian anak didik di lingkungan pendidikan agama pun juga ikut terkontaminasi dengan pergulatan ideologis mencari alternatif idealisme lain. Cela-celah tantangan ideologis seperti ini kembali menghadirkan pula pengaruh rradikalasi nilai-nilai keagamaan oleh sebagian ormas-ormas garis keras. Di sisi lain, munculnya perdebatan mungkin atau tidaknya kekuatiran akan bangkitnya ideologi Komunisme, bisa saja menimbulkan kegalauan pemahaman di kalangan anak didik kita.

KONSEPSI Bela Negara yang dianut oleh Indonesia secara mendasar mengacu kepada konstitusi NKRI (UUD 1945). Dalam konstitusi ini disebutkan bahwa semangat dan upaya Bela Negara merupakan hal yang vital (hak dan kewajiban) bagi semua warga negara Indonesia (Pasal 27 ayat 3 UUD 1945). Konsepsi Bela Negara ini secara substansial mengandung 5 (lima) nilai dasar, yaitu Cinta Tanah Air, Sadar Berbangsa dan Bernegara, Yakin Pancasila sebagai Ideologi Negara, Rela Berkorban untuk Bangsa dan Negara, dan Memiliki Kemampuan Awal Bela Negara.

Dalam rangka untuk mensosialisasikan kembali PKBN ini, perlu dilakukan revitalisasi terhadap konsepsi Bela Negara. Agar tidak terkesan dogmatis atau doktriner, konsepsi Bela Negara ini sebaiknya diformulasikan kembali, relevan dengan kemungkinan ancaman dan tantangan ideologis saat ini. Salah satu upaya revitalisasi konsepsi Bela Negara ini adalah bagaimana pemahaman terhadap Pancasila sebagai ideologi Negara relevan dengan dinamika ancaman nyata saat ini. Beberapa dinamika ancaman ideologis yang mengemuka telah diuraikan secara gamblang di atas.

Untuk merevitalisasi konsepsi Bela Negara khususnya nilai Keyakinan Pancasila sebagai ideologi negara, dapat ditempuh beberapa langkah strategis berikut ini. Pertama, Presiden

dan semua lembaga tinggi pemerintahan lainnya perlu segera untuk merumuskan payung hukum yang tepat bagi penyadaran kembali pentingnya Ideologi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Upaya ini juga selaras dengan wacana untuk kembali memunculkan konsepsi semacam pedoman haluan negara (GBHN) yang sesuai dengan Sistem Hukum Ketatanegaraan dan Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia (UUD 1945). Kedua, semua kementerian perlu merumuskan kembali program pembinaan kesadaran Ideologi Pancasila sesuai dengan lingkup kewenangan, tugas dan tanggungjawabnya masing-masing. Perumusan ini dapat dilakukan oleh Badiklat dan Balitbang yang ada di tiap kementerian, tentunya secara fungsional di bawah koordinasi setiap kemenkonya, sehingga dapat diselaraskan kepada penjabaran kebijakan dan program kerja pemerintahan. Ketiga, semua pemangku kepentingan dalam pendidikan nasional di Indonesia sudah saatnya untuk merumuskan kembali penguatan materi Ideologi Pancasila dalam kurikulum pembelajaran di setiap tingkat pendidikan. Perumusan ini harus disesuaikan kepada ancaman dan tantangan ideologis yang benar-benar rentan pada kondisi kemajemukan (pluralisme) masyarakat Indonesia.\*\*\*



## PUSAT KEUANGAN (PUSKU) KEMENTERIAN PERTAHANAN

### KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

#### Pusat Keuangan.

Pusat Keuangan selanjutnya disebut Pusku adalah unsur pendukung pelaksana tugas dan fungsi pertahanan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri melalui Sekjen.

Pusat Keuangan dipimpin oleh Kepala Pusat Keuangan disebut Kapusku. Pusat

Keuangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok Kementerian di bidang pembinaan dan administrasi keuangan serta pendayagunaan sumber dana pertahanan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Pusat Keuangan menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang keuangan pertahanan;

2. Pengelolaan keuangan termasuk devisa dan bantuan proyek pertahanan;
3. Pengendalian pencocokan dan penelitian pertanggung-jawaban keuangan dan tagihan regularisasi;
4. Pengendalian dan evaluasi pengelolaan administrasi keuangan pertahanan;

5. Pembinaan pelayanan administrasi keuangan pertahanan;
6. Pembinaan fungsi dan bimbingan teknis di bidang pengelolaan keuangan pertahanan;
7. Pelaksanaan pengendalian keuangan meliputi pencocokan penelitian dan perhitungan pertanggung jawaban keuangan pertahanan;
8. Pelaksanaan pengelolaan penerimaan, kerugian dan pelaporan penerimaan pendapatan negara pertahanan;
9. Pelaksanaan rekonsiliasi laporan akuntansi keuangan dengan laporan akuntansi barang milik negara pertahanan;
10. Penyiapan rumusan, penyusunan laporan keuangan pertahanan; dan
11. Penyiapan bahan perencanaan program dan anggaran, evaluasi dan laporan, pembinaan kepegawaian, data dan informasi, dokumentasi, ketatalaksanaan dan kelembagaan serta ketatausahaan dan kerumahtanggaan Pusat.

## **STRUKTUR ORGANISASI**

Pusku terdiri atas:

1. Bagian Tata Usaha,
2. Bidang Pengendalian dan Administrasi Keuangan,
3. Bidang Pelaksanaan Pembia-yaan,
4. Bidang Keuangan Kemente-rian,
5. Kelompok Jabatan Fungsio-nal.\*\*\*





## PUSAT DATA DAN INFORMASI (PUSDATIN) KEMENTERIAN PERTAHANAN

### KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

#### Pusat Data dan Informasi.

Pusat Data dan Informasi selanjutnya disebut Pusdatin adalah unsur pendukung pelaksana tugas dan fungsi Kementerian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri melalui Sekjen. Pusat Data dan Informasi dipimpin oleh Kepala Pusat Data dan Informasi disebut Kapusdatin.

Pusdatin mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok Kementerian di bidang pembinaan, pengembangan dan standardisasi teknis sistem informasi, teknologi informasi, sistem komunikasi data, persandian, dan menyelenggarakan sistem informasi pertahanan negara, layanan pengadaan secara elektronik serta mengoperasionalkan siber pertahanan negara.

Dalam melaksanakan tugasnya,

Pusat Datin menyelenggarakan fungsi:

1. Pengembangan sistem informasi pertahanan, perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pembinaan data, teknologi dan informasi pertahanan;
2. Penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, prosedur, pelaksanaan, evaluasi kebijakan teknis, pelaksanaan bimbingan, supervisi tek-

nis teknologi informasi pertahanan, operasional sistem informasi pertahanan negara, layanan pengadaan secara elektronik (LPSE), operasional pertahanan siber yang meliputi sistem aplikasi, pengumpulan dan pengolahan data serta sistem komunikasi data;

3. Pelaksanaan dukungan teknis operasional, perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pembinaan data, teknologi dan informasi pertahanan;
4. Penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, prosedur, teknologi, informasi pertahanan, pelaksanaan dan

evaluasi kebijakan teknis, pelaksanaan bimbingan, supervisi teknis teknologi informasi pertahanan, operasional sisfohaneg, operasional pertahanan siber yang meliputi pemeliharaan sistem komputer dan sistem komunikasi serta operasional sistem informasi.

5. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pembinaan data, teknologi dan informasi pertahanan penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan teknis, pelaksanaan bimbingan serta supervisi teknis teknologi informasi pertahanan,

operasional sisfohaneg, operasional.

## **STRUKTUR ORGANISASI**

Pusdatin terdiri atas:

1. Bagian Tata Usaha,
2. Bidang Pengembangan Sistem Informasi Pertahanan,
3. Bidang Dukungan Operasional,
4. Bidang Informasi dan Persandian,
5. Kelompok Jabatan Fungsional.\*\*\*





## PUSAT KOMUNIKASI PUBLIK (PUSKOM PUBLIK) KEMENTERIAN PERTAHANAN

### KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

#### Pusat Komunikasi Publik.

Pusat Komunikasi Publik selanjutnya disebut Puskompublik adalah unsur pendukung pelaksana tugas dan fungsi pertahanan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri melalui Sekjen. Pusat Komunikasi Publik dipimpin

oleh Kepala Pusat Komunikasi Publik disebut Kapuskompublik. Pusat komunikasi Publik mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok Kementerian di bidang informasi penyelenggaraan pertahanan negara.

Dalam melaksanakan tugasnya, Puskompublik menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang informasi pertahanan dan dokumentasi;
2. Penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang pemberitaan, opini dan kerjasama informasi pertahanan;
3. Pelaksanaan dan evaluasi



kebijakan teknis di bidang pemberitaan, opini dan kerjasama informasi pertahanan;

4. Pelaksanaan bimbingan, supervisi teknis dan pengendalian di bidang pemberitaan, opini dan kerjasama informasi pertahanan; dan
5. Penyiapan bahan perencanaan program dan anggaran, evaluasi dan laporan, pembinaan kepegawaian, data dan kepustakaan, ketatalaksanaan dan kelembagaan

serta ketatausahaan dan keru-mah tanggaan Puskompublik.

## **STRUKTUR ORGANISASI**

Puskompublik terdiri atas:

1. Bagian Tata Usaha,
2. Bidang Pemberitaan,
3. Bidang Opini,
4. Bidang Kermainfo,
5. Kelompok Jabatan Fungsional.\*\*\*





## PUSAT REHABILITASI (PUSREHAB) KEMENTERIAN PERTAHANAN

### KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pusat Rehabilitasi selanjutnya disebut Pusrehab adalah unsur pendukung pelaksana tugas dan fungsi pertahanan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri melalui Sekjen. Pusat Rehabilitasi dipimpin oleh Kepala Pusat Rehabilitasi disebut Kapusrehab.

Pusrehab mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok Kementerian di bidang rehabilitasi medik, rehabilitasi vokasional, rehabilitasi sosial dan perumahsakitan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Pusrehab menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan bahan perumusan

dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang rehabilitasi penyandang disabilitas personel pertahanan;

2. Penyiapan dan penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang rehabilitasi medik, rehabilitasi vokasional, rehabilitasi sosial dan perumahsakitan;

3. Pelaksanaan dan evaluasi kebijakan teknis di bidang rehabilitasi medik, rehabilitasi vokasional, rehabilitasi sosial dan perumahsakitan;
4. Pelaksanaan bimbingan, supervisi teknis dan perizinan di bidang rehabilitasi medik, rehabilitasi vokasional, rehabilitasi sosial dan perumahsakitan; dan
5. Penyiapan bahan perencanaan program dan ang-

garan, evaluasi dan laporan, pembinaan kepegawaian, data dan informasi, dokumentasi, kepustakaan, ketatalaksanaan dan kelembagaan serta ketatausahaan dan kerumah tanggaan Pusat.

3. Bidang Rehabilitasi Vokasional,
4. Bidang Rehabilitasi Sosial,
5. Kelompok Jabatan Fungsional.\*\*\*

## **STRUKTUR ORGANISASI**

Pusku terdiri atas:

1. Bagian Tata Usaha,
2. Bidang Rehabilitasi Medik,





## THE MINISTRY OF DEFENSE HIGH LEVEL OFFICIALS MEETING 2017



NATIONAL DEFENSE POLICY 2017

IMPLEMENTATION OF MENTAL  
REVOLUTION THROUGH STATE  
DEFENSE EDUCATION IN ORDER TO  
DEVELOP ECONOMIC RESILIENCE

REVITALIZATION OF STATE  
DEFENSE AWARENESS  
DEVELOPMENT & PANCASILA

PROFILE OF MINISTRY OF DEFENSE'S  
UNIT



ISSN 1693-0231



9 771693 023126

KEMENTERIAN PERTAHANAN  
REPUBLIK INDONESIA

JENDERAL SOEDIRMAN



# 64/48

JAN-FEB 2017



## EDITORIAL BOARD

### Advisors:

Minister of Defense  
General (Ret.) Ryamizard Ryacudu

Secretary General of MoD  
Vice Admiral Widodo, M.Sc

### Editor in Chief:

Head of Public Communication Center of MoD  
Brig. Gen. Djundan Eko Bintoro, M.Si (Han)

### Managing Editor:

Chief of Information Cooperation of Public Communication Center  
Col. Drs. Sylvester Albert Tumbol, M.A.

### Editors:

Ltc. Joko Riyanto, S.Sos, M.Si.  
Mutiara Silaen, S.Ikom, M.AP

### Graphic Design:

1<sup>st</sup> Lt. Farah Merila S, S.Kom.  
Imam Rosyadi

### Photo:

Photographers of Public Communication Center of MoD

### Circulation:

Nadia Maretti, S.Kom, M.M.

### Published by:

Public Communication Center of MoD,  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 13-14 Jakarta  
Telp. 021-3829236



# Editorial

Dear kind readers,

We warmly greet you in this first edition of WIRA in 2017, in a new format.

Wira edition of January-February brings theme related to the defense policies. such as High Officials Meeting 2017 and National Defense Policy 2017. We also have out forward articles about Implementation of Mental Revolution Through State Defense Education in Order to Develop Economic Resilience, Revitalization Of State Defense Awareness Development & Pancasila and Profile of Financial Center Data & Information Center, Public Communication Center and Rehabilitation Center.

To enrich articles of this WIRA magazine, we continuously expect your participation to send articles, opinions, information, responses, or critics and recommendations through email [redaksi.wira@kemhan.go.id](mailto:redaksi.wira@kemhan.go.id). WIRA magazine can also be accessed online in [www.kemhan.go.id](http://www.kemhan.go.id).

# Contents

6

## THE MINISTRY OF DEFENCE HIGH LEVEL OFFICIALS MEETING 2017



General (Ret) Ryamizard Ryacudu – the Minister of Defense opened the second day of the High Level Officials Meeting on Thursday, 12 January 2017, at the Ministry of Defense's office, Jakarta. He mentioned that a strong national defense must be supported by appropriate policy as guidelines and directions of national defense development..

32

## PROFILE

FINANCIAL CENTER OF  
MINISTRY OF DEFENSE

DATA & INFORMATION CENTER  
OF MINISTRY OF DEFENSE

PUBLIC COMMUNICATION  
CENTER OF MINISTRY OF  
DEFENSE

REHABILITATION CENTER  
OF MINISTRY OF DEFENSE

28

## REVITALIZATION OF STATE DEFENSE AWARENESS DEVELOPMENT & PANCASILA

Looking at the facts that illustrate how pervasive massive ideological threat that might get into the life of our nation and society, it is crucial for the state to "return to the ideology of Pancasila"

10

## NATIONAL DEFENSE POLICY 2017



National defense policy is conducted to manage all national resources and infrastructures to achieve national defense objectives in order to support national development.

18

## IMPLEMENTATION OF MENTAL REVOLUTION THROUGH STATE DEFENSE EDUCATION IN ORDER TO DEVELOP ECONOMIC RESILIENCE

One thing that can support realization of national resilience through state defense is to do the best in relation with profession and position of each citizen and by using whatever skills the citizen's have for the interests of nation and state for security and welfare purposes, as well as implementing national discipline in compliance with all laws and regulations as well as state legislation, it is indeed the essential dimension of State Defense



## THE MINISTRY OF DEFENCE HIGH LEVEL OFFICIALS MEETING 2017

By:  
Editorial Team

The Ministry of Defense High Level Officials Meeting is an annual event. It is a framework to deliver national defense policy that will be a guideline for Ministry of Defense and TNI in 2017. The theme of the meeting 2017 was "Improving the Spirit of State Defense, Military Professionalism and Independence in Defence Industry Supported by Clean and Good Governance to Achieve Strong National Defense". This theme persuades us to continue building a strong national defense through spirit of state defense, military professionalism and independence in defense industry as well as clean and good governance.

General (Ret) Ryamizard Ryacudu – the Minister of Defense opened the second day of the High Level Officials Meeting on

Thursday, 12 January 2017, at the Ministry of Defense's office, Jakarta. He mentioned that a strong national defense must be supported by appropriate policy as guidelines and directions of national defense development. This policy should become the sole reference for implementation of national defense. Yet, it will achieve the intended goals only if it is based on good policy.

National defense is designed to preserve and protect country's sovereignty, territorial integrity of Republic of Indonesia, as well as safety of the entire nation from all forms of threats. In facing such threats, we should rely on military professionalism, weapon system supported by reliable defense industry, as well as public participation from citizens who have state defense values –

those ideal citizens can be generated from State Defense Awareness Development Program.

One of important things in national defense is to prepare people's strength that fully equipped with the spirit of state defense. The Minister of Defense said that in 2017, there should be various activities that would be implemented pertaining state defense program. It is expected that development of people's strength can produce deterrent effect towards potential threats in the region.

The main purpose of state defense program is that every citizen has awareness reflected in their attitudes and behaviors that upholds importance of actualizing state defense values, such as patriotism, consciousness of

nation and state, loyal to *Pancasila* as state ideology, willing to sacrifice for the nation, as well as having the ability to contribute in ensuring survival of state and nation as well as in the form of mental revolution in building deterrent power of the nation to face complexity of the current threats.

The Minister had emphasized that all high officials in Ministry of Defense should fully support state defense program, especially in coordination and intensive approach to other ministries/institutions, as well as to promote state defense in other ministries/institutions. On the other hand, *TNI* - whose units are the spearhead to ensure successful operations of this program - should support and play dominant roles

to ensure the success of this program. Hence, the Minister of Defense wishes *TNI* to jointly support and ensuring successful state defense program. Togetherness of *TNI* and Indonesian people will give more support to *TNI* in performing its main tasks i.e. maintaining sovereignty, safety of nation, as well as integrity of state and nation.

1945 Constitution gives mandates that Indonesia should participate in implementing world order based on freedom, everlasting peace and social justice. Indonesia also embraced independent and active foreign policy. Therefore, Ministry of Defense has always been committed to establish cooperative and collaborative defense co-operation with strategic partner

countries who have good will for world peace and regional stability.

The Minister of Defense had empathised six points to be put attention on to support National Defence Policy 2017, as follows:

First, to be guided by National Defense Policy 2017 in establishing and implementing the working programs within Ministry of Defense and *TNI* in 2017 in order to meet National Defense Strategic Plan.

Second, to pay attention on the strategic environment development in the region while at the same time, enhance coordination and synergy with all stakeholders in realizing strong national defense.





Third, to be guided by laws and regulations in national defense management.

Fourth, to use the budget in efficient, effective, good and right administrative conduct based on Financial Accounting System and S/IMAK BMN, and avoid to violate the law and regulations.

Fifth, to increase solidarity and unity between Ministry of Defense and *TNI* as well as to well coordinate and synergize with other stakeholders to support the success of carrying out the task.

Sixth, to carry out maintenance and intensive care of

weapon system properly in accountability manners as well as to minimize occurrence of accidents – we should realize that weapon system can be repaired and purchased but soldiers' life cannot be replaced by anything.

The High Level Official Meeting was attended by *TNI* Commander, Chief of Army, Navy and Air Force, Secretary General of Ministry of Defense, Inspector General of Ministry of Defense, Echelon I and II within the Ministry of Defense as well as a number of officials from *TNI* Headquarters, Army, Navy and Airforce Headquarters, and Defense Industry Policy Committee. Also present in the meeting were

several official representatives from related Ministries/Institutions.

The High Level Officials Meeting of Ministry of Defense had been held for 2 days. The first day meeting was to discuss and to reflect Minister of Defense 2016 working program and projected activities in 2017. The Secretary General of Ministry of Defense – Vice Admiral *TNI* Widodo, M.Sc. stressed on leadership of the Ministry of Defense Working Units that should hold on to three pillars of policy, namely mutual trust building, defense capacity building, and promoting self-reliance of Indonesia defense industry.



The Secretary General of Ministry of Defense confirmed that state defense program has been the icon of Ministry of Defense. State defense program is to actualize *Pancasila* values in development of defense human resources. Starting in 2017, state defense educational program should be the preliminary educational material for new university students. Therefore, the Ministry of Defense must prepare variety of devices both personnel and software to support this program.

In reference to defense industry, the Secretary General had stressed that strengthening defense industry program should

be made to realize the use of domestic products. In this case, the Ministry of Defense will continue to push for defense national industry products to meet standards and quality required by TNI.

The working program must be elaboration of Ministry of Defense strategic plan and series of related programs in concurrent years. The evaluation results of 2016 working program has became a foothold in implementation of 2017 working program. Reflection of 2016 working program should be continuous with 2017 working program. Hence, the development of national defense system of each working unit/sub working units can be run well based on appropriate duties and functions.

The budget absorption of Ministry of Defense and TNI in 2016 Fiscal Year up to 28 December 2016 was as much as 84.89%. In the same period of 2015 Fiscal Year, it was only 79%. It has shown increasing impact and acceleration of implementation of the activities. For effective, efficient and accountable program, working units in the Ministry of Defense should not only examine or evaluate aspects in the budget, but also includes public policy accountability variables as well.

The importance of loyalty and togetherness was also being emphasized. Loyalty is fundamental to an institution, given in-

creasingly dynamic and complex challenges ahead. Loyalty is the engine of an organization. Without loyalty and togetherness, administration of the organization - especially in the field of defense - will not run properly. The stakeholders should be loyal in line with the appropriate roles and functions. The output can be seen in togetherness without prioritizing sectoral ego.

Implementation of Executive Meeting of Ministry of Defense is a strategic move to evaluate 2016 Fiscal Year working program implementation as well as to examine the prospects for success of 2017 Fiscal Year working program. Although internal working also relates to other relevant institutions, especially with TNI Headquarter and Army, Navy and Airforce Headquarters. The 2017 meeting was expected to provide positive energy for national defense system improvement.

During leading the first day of the Meeting of Ministry of Defense 2017, the Secretary General of Ministry of Defense was accompanied by Inspector General of Ministry of Defense - Vice Marshall Hadi Tjahjanto and Rector of Indonesia Defense University - Lt. Gen. Dr. I Wayan Midhio, M.Phil. Officials of Echelon I and II of the Ministry of Defense as well as the leaders of Defense Industry Policy Committee, Asabri and YKPP attended the meeting.\*\*\*

# NATIONAL DEFENSE POLICY 2017

## 1. GENERAL

National defense policy is conducted to manage all national resources and infrastructures to achieve national defense objectives in order to support national development. In building national defense, the management and implementation of national defense system should be conducted comprehensively – hence there is a need of a policy that covers various aspects of national defense. National defense policy should also be flexible and adaptive to be realized through policy direction and targets.

## 2. POLICY DIRECTIONS

a. To follow national defense development that consistent with *Pancasila*, 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, unity Indonesian, and Unity in Diversity principle, i.e. following national political policy in the form of law and legislation that have principles of democracy, civilian supremacy, human rights, national law provisions and ratified international law.



b. To be guided by vision, mission and priority programs of the Government, including world maritime shaft policy that supported by the use

of satellite technology and drone systems; general policy and national defense policy 2015-2019; as well as national defense strategic plans 2015-2019.



c. To continue development of Military Defense Posture that is directed to realization of Main Equipment Weapon System/Minimum Essential Forces of TNI as

in reference to the long term TNI ideal posture development concept, including modernization of MEF, maintenance and care, organizational

development and compliance infrastructure, as well as supporting the ability of defense industry and professionalism in increasing prosperity.

- d. To strengthen cooperation with neighboring countries in appropriate defense diplomacy in accordance with laws and legislations within the framework of capacity building and increasing active role in Peacekeeping Operations in the form of military deployment for world peace under the United Nations.
- e. To materialize strong, independent and competitive defense industry through increasing role of Defense Industry Policy Committee in formulating defense industry national policy.
- f. To Support national character development in the context of mental revolution by fostering state defense awareness and ability to develop state defense values.
- b. The realization of policies in national defense management and implementation by analyzing strategic environmental development analysis to evaluate threats in the development of world maritime shaft.
- c. The implementation of the discussion of the Draft of Law, Government Regulation, Presidential Decree, Ministry of Defense Decree, and the provision of other regulation implementation for the benefit of national defense, as well as cumulative open legislation on the ratification of international treaties in defense sector.
- d. The establishment of organizational reforms including continuation of vertical institutions and



### **3. POLICY OBJECTIVES**

- a. The development of human resource potential that guarantee availability of components and national defense elements, the use of natural and artificial resources, as well as national in-frastructure through collaboration with other Ministries/ Institutions, local governments, as well as other national components.

military unit formations, both centralized and territorial based in reference to TNI's pyramid structure, career coaching for military personnel and civil servants, legal guidance and good assets governance as well as effective budget.

- e. The realization of national defense intelligence development through the

establishment of Defense Intelligence Agency and the network system of intelligence as well as accurate, current, and integrated real time information systems for information exchange between national and international intelligence institutions.

- f. The realization of national defense information sys-

tems development based on cyber defense through procurement of independent defense satellite communications, fulfillment of public information field in national defense as well as increased professionalism of human resources and their supporting infrastructures.

- g. The realization of the accountability of budget



management through pre audit, cur-rent audit, post-audit monitoring patterns to achieve Reasonable standard without exception opinions ratings by Supreme Audit Agency, to improve application of Internal Control Systems, the strengthening of Bureaucratic Reform, and accelerated realization of Integrity Zone towards Corruption-Free Area.

h. The realization of reliable national defense capability

in facing real and not real threats, as well as construction of maritime shaft through TNI's MEF compliance that supported by strong, independent and competitive defense industry, upgrading the mobility in the form of heavy transport equipment and military combat power, as well as preparation of standby forces, especially for natural disaster management, humanitarian assistance, border security, and for peacekeeping

missions tasks and other type of emergencies.

i. The increase of border regions development by addressing border and security management with integrated security belt, and the synergy between stakeholders through coordination and cooperation in improving security development and border infrastructures at land border of Kalimantan in the form of Border Patrol Inspection Line and





Administration Line, at land border of Papua in the form of Connecting Lines and Logistics Line, at land border in East Nusa Tenggara in the form of infrastructures and supporting infrastructure for border security. Beside that, there are activities to improve the management of the outermost small islands/forefront islands where the priorities are *Natuna Islands*, *Merauke*, *Saumlaki/Selaru*, *Biak* and *Morotai*.

j. The implementation of supervision and monitoring

towards the entire national vital objects against variety of threats.

k. The increase of deployment of naval forces and air power in for law enforcement and prosecution of illegal activities at sea including violations of sea border area under national jurisdiction, and to develop maritime potentials in outermost small islands/forefront islands in the framework of development of world maritime axis.

l. The increase of deployment

of armed force and air power in the effort to secure land borders and the outermost/forefront small islands under national jurisdiction in order to prevent violations of land border area, as well as for territorial development.

m. The increase of deployment of air power in the form of security patrols towards national airspace in effort of monitoring, surveillance and law enforcement of air areas under national jurisdiction in the context of the development of



maritime shaft, as well as to encourage related Ministries/Institutions to accelerate realignment of Flight Information Region and the implementation of aerospace potential development.

n. The realization of deployment of proportional defense forces throughout the country for security and ensuring national jurisdictions through centralized deployment of forces as well as integrated and synergistic territorial development in the context of the development of maritime shaft.

o. The establishment of

bilaterally and multilaterally international cooperation in the context of Confidence Building Measure and to reinforce identity as an archipelago and maritime country with reference to open and active foreign policy, as well as addressing common security issues through defense dialogue and strategic partnership with other countries.

p. The increase of professional troop allocation that supported with adequate equipment and infrastructures for peacekeeping missions activities as in accordance to needs and requests of the UN, as well as an effort to

meet the delivery target of 4,000 (four thousand) peacekeepers.

q. The utilization of Indonesian Peace and Security Center in preparing peacekeeping forces for both national and international needs.

r. The implementation of defense diplomacy through strategic defense dialogue, security dialogue, and strategic partnerships with friendly countries as well as well-organized mechanism of function of Defense Attaché as element of the military to conduct defense diplomacy for the benefit of the Ministry of Defense and the interests of the TNI

within Indonesian Mission abroad as in accordance with applicable laws and legislations.

s. The improvement of development of integrated Defense Industry that pay attention on security technology through Ministries/Institutions within the scope of Defense Industry Policy Committee, to improve mastery of science and technology and transfer of technology



in the procurement of Main Equipment Weapon System/Minimum Essential Forces in order to build defense capability.

t. The development of infrastructure to realize independent domestic defense industry to improve cooperation and development of new products as well as maintenance of Main Equipment Weapon System/Minimum Essential Forces in order to build



u. The increase of



science and technology mastery through research and development as well as technological innovation in Main Equipment Weapon System/Minimum Essential Forces by involving users, research and development institutions, universities, and national defense industry that is implemented in strategic programs including drone system development,

fighter jet KF-X/IF-X, submarine construction, propellant industry development, national rocket development, national missile development, national radar development, and manufacturing of medium build tanks.

v. The realization of State Defense Awareness Development through socialization, education, training, and cooperation between Ministry of Defense, Ministries/Institutions, local governments, and other national components in organizing the formation of state defense cadres in household, education and employment environment as in efforts to establish State Defense cadres.\*\*\*

Kuliah Umum  
MENTERI PERTAHANAN RI  
Jenderal TNI (Purn)  
Bpk. RYAMIZARD RYACUDU  
Bersama Mahasiswa se-Sumatera Barat  
di Universitas Negeri Padang

Minggu, 18 Desember 2016

## IMPLEMENTATION OF MENTAL REVOLUTION THROUGH STATE DEFENSE EDUCATION IN ORDER TO DEVELOP ECONOMIC RESILIENCE

By :

Major General TNI Hartind Asrin, M.I.Kom

Head of Education and Training Agency - Ministry of Defense

### INTRODUCTION

Educational institutions have important role to boost social changes in any state. This contribution has been recognized to appear in various education traditions, from political, economic, social, culture to national values. In relation to tradition of nation's civilian and military educational programs, the Education and Training Agency of Ministry of Defense can be seen as the main actors throughout history and consistent in its role. However, the Ministry of Defense's Education and Training Agency cannot be assumed as the same as military education institution in general. The uniqueness of this

Education and Training Agency is on the values of everyday life that might have become dogma of some sort, yet it is also still flexible to adapt and to accept relative changes.

One of the factors that encourage Education and Training Agency of Ministry of Defense to accept changes is globalization. Various experts' views on globalization is essentially argue two things: the first is that globalization is pushing nation countries towards homogenization and no borders so as to narrow into a global village, and the second is the reduction in the authority of the State over territorial sovereignty and economic sovereignty.

The most important moral message in response to globalism is actually not at the level of agreement or disagreement, but rather on how to prepare all citizens to face globalization without mortgaging sovereignty of ideological, political, economic, social, cultural and territorial within the context of security and defense. The Ministry of Defense as the government institution then has the responsibility to formulate National Defense General Policy and to establish National Defense Implementation Policy.

One of current challenges faced by the Ministry of Defense and for the next 10 years is the need to increase state



defense awareness for every citizen, through State defense education and training, while in parallel also discussing the national legislation program 2015-2019, that mainly on the Draft of Law On Management of Defense National Resources. We believe that the bill on the management of Defense National Resources is only a matter of time, because the state defense has been mandated by the 1945 Constitution in article 27, paragraph 3, that every citizen is entitled and obliged to participate in the effort of state defense.

It involves understanding that the implementation of state defense by Ministry of

Defense will oversee every citizen in using the right and obligation to participate in state defense efforts. The form is through education and training of national cadres, which is now has become a very important practice, especially in the era of global economy in where economic sovereignty of the country is getting smaller by weakening of community's commitment towards *Pancasila* as the national values that have long been a principle and views of life. Education is a process of awareness (conscientious), or to raise awareness of human activity towards all they have such as potential, intellectual, emotional and behavioral. It shows that awareness has been

potentially existed within us from birth as a power, including the power to know, to sense, that should be further developed in the next life to become real-time capability. This development process will be taking place in educational process, through teaching, exemplary way, way of life, guidance and counseling.

In the state defense awareness educational context, the question raised is on what kind of awareness that is going to be built? The answer is the awareness of the citizens towards threats, challenges, obstacles and interference, both

from within and from outside country towards the state: its sovereignty, territorial integrity, and safety of the entire nation.

## MENTAL REVOLUTION IN DESIGNING NATIONALISM VALUES

One thing that can support realization of national resilience through state defense is to do the best in relation with profession and position of each citizen and by using whatever skills the citizen's have for the interests of nation and state for security and welfare purposes, as well as implementing national discipline in compliance with all

laws and regulations as well as state legislation, it is indeed the essential dimension of State Defense. Mental Revolution has drained enough energy from various parties, particularly associated with distortions of national values. Through lively discussion and with reference to *Pancasila* and *Trisakti*, it was agreed that the most important values to be developed in Mental Revolution are six components, namely:

1. Citizenship. This value needs to be developed so that Indonesian people do not feel as a resident but as a citizen who has awareness and sense of balance between rights and obligations.
2. Trustable. This is the decreasing abandoned and neglected value in our society. It is needed to rebuild and increase those values in all aspects of life.
3. Independence. Independence Value needs to be rebuilt, not only by the public but also by the Government that can facilitate this through improvement of development

policies and regulations that promote independence.

4. Creativity. We must realize that our natural resources are limited, but our creativity is not. With Mental Revolution we must awaken creativity of our nation to the point of boasting internationally.
5. Mutual-Help. Mental Revolution must restore the character of mutual help at the community level up to the political and economic system that is into a more macro and modern form.
6. Mutual Respect. As a pluralistic nation, the survival of Indonesia relies heavily on this value. Mental Revolution should be able to restore the character of our nation that is known for its tolerance and friendliness.

The end of the lack commitment towards national values is distorted nationalism. In the concept level, it can be narrated that national values is the value that is inherent in every citizen or goodness norms contained and characterized personality of Indonesian nation derived from values of *Pancasila*, the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, United





Republic of Indonesia as well as Unity in Diversity as reflected in attitudes and behaviors of every citizen as Indonesia nation who always put national unity and territorial integrity within society, nation and state, without prejudice, and with the responsibility to respect other states and nations.

For civilized, sovereignty Indonesian nation, it contains not only the "privilege" of jurisdiction to regulate, to enforce the law and to prosecute all matters within territory of the country, but it also contains responsibility to respect human values on the basis of norms, universal values and standards, also respects to other countries in order to

be able to ensure welfare as well as national, regional and international security.

Weak commitment to the values of nationalism that is precisely strategic value as identified as above is a very serious national problem since it leads to a distortion of nationalism. In this context, we can see there are two factors, namely external factors and internal factors. External factors, such as the impact of globalization that inspire liberalism will lead to the birth of capitalism in economics and liberal democracy in the political field. On the other hand, internal factors are sourced from internal. This reality arises from mistakes

in understanding *Pancasila*. Therefore, conceptually State Defense is triggered by:

1. Determination, attitudes and actions of citizens that are organized, comprehensive, integrated and continuing,
2. Based on love of the homeland,
3. Awareness of nation and state of Indonesia,
4. Belief in the supernatural *Pancasila* as state ideology,
5. Willingness to make sacrifices in order to negate any threats both foreign and domestic that endanger independence



and sovereignty, unitary and national unity, territorial integrity and national jurisdiction, as well as the values of *Pancasila* and the Constitution of 1945.

The above five (5) concepts are the basic level of core subject in State Defense area that has been held by the Education and Training Agency of Ministry of Defense. Referring to the explanation of Article 9 of Law No. 3 of 2002, State Defense can be defined as attitudes and behavior of citizens inspired by their love for the Republic of Indonesia based on *Pancasila* and the Constitution of 1945 in ensuring the survival of the nation and the State.

### STATE DEFENSE RESPONDS TO DEVASTATING NATION STATE

One way to answer questions on reduction of sovereignty or even loss of territorial sovereignty as a result of globalization of world economy by Kenichi Ohmae in the book "The End of the Nation" State is to examine influences of the so-called four "I"s.

First, Investment. Capital markets in most developed countries are equal to the surplus funds for investment. Therefore, capital markets are developed as a broad variety of mechanisms to transfer billions of deposits transcend national boundaries.

Therefore, the investment, the first "I", is no longer restricted geographically. Now, wherever we live in the world, the chances are there, it is very interesting, and money will continue to enter.

Second, Industry. The current industry is also much more global in orientation than in a decade ago. In the past, government's interests are obviously a problem. Companies must perform many agreements with many governments to market a wide range of resources and skills to be exchanged in order to gain privileged access to local markets.

Movement of investments and industry has long been

facilitated by third "I", Information Technology. Information technology allows company to operate in various parts of the world without having to build a whole business system with each representative. The engineers at a certain State can easily control the plant operations in another State. The designers of the product in one country can control the activities of a network of companies in other countries.

Finally, the fourth "I", Individual. The individual consumer also has a more global orientation. With better access

to information on lifestyles around the world, the desire to buy is no longer conditioned by government restrictions. The consumers increasingly want the best and cheapest products, no matter where it comes from.

Simultaneously, the mobility of the four Is makes economic units in many parts of the world become possible to get whatever they need for development. Since global market applies to everything, the four "I"s work accordingly, then nation states no longer have to play their role as a market maker. Based

on Ohmae's thinking, it appears that the tendency of decreasing the role of State is a result of the globalization process, the State has lost the spirit of the central policy makers for economic actors, including losing the ability to keep their territory from the invasion of foreign products. The most important moral message important in responding to globalism is not on the level of agreement or disagreement, but rather on how to prepare all citizens to face the intentions of globalization without mortgaging the sovereignty of ideology, political, economic, social,



cultural and territorial in the context of defense and security.

## DISCLOSURE OF ECONOMIC GLOBALIZATION

Is a fact that resilience of a country will get stronger due to strong economic resilience. On the other hand, the resilience will be vulnerable if the economy is weakened. Many countries are in disarray because it begins with a fragile economy or injustice in development. In

this economic matter, we must now face a new reality, namely the openness of economic globalization. If in ancient times, when the economy of a country experiencing a shortage, the country can occupy other countries. Now, on the contrary, the states with difficulties in natural resources should be able to bring economic resources into the country. Parallel with the spirit of economic sovereignty, in the face of global economic openness, it becomes a necessity when the economic spirit of *Pancasila* should be the national economic policy guidelines.

is an economic system that is humane, populist, as well as support realization of the unity of Indonesia. Economic system based on belief in God is economic system that considers ethics and social concern as a form of accountability to Almighty God. Humane economic system is an economic system that makes human beings as subjects, neither as objects nor commodity, as mandated by just and civilized humanity. Populist economic system is an economic system, which is based on the welfare of the people as, mandated democracy led by the wisdom/representative. Fair economic system is an economic system that is able to maximize

*Pancasila* economic system



Source: BeritaDaerah

equity. A fact that in this era of globalization, a country cannot be isolated itself from other countries. Each country is interconnected and dependent on other countries. Globalization is inevitably simply unacceptable. However, a critical attitude towards the negative impacts caused by globalization needs to be done.

The right attitude is not becoming a victim of globalization, but the perpetrators of globalization. Good values need to be adopted and adapted to traditional values, morals, and religion of Indonesia.

Faced with globalization, Thomas L. Friedman proposed that each country should wear suitable clothes that he calls the golden straitjacket. For that, every country needs to implement the principles of economics such as:

1. Placing the private sector as the main driver of economic growth.
2. Maintain the inflation rate at a low level.
3. Maintaining the stability of the prices of goods and services.
4. Reducing the role of the bureaucracy.
5. Maintain a balanced budget or a surplus.
6. Removing or lowering all import tariffs.
7. Removing all barriers to foreign investment.
8. Liberating any form of quotas and monopoly.
9. Increasing exports.
10. The efforts to privatize the industrial goods and services.



sumber: ldiimimika.wordpress.com

11. Deregulation of the economy to provide opportunities to a growing competition.

12. Combating corruption within the bureaucracy.

Based on the above various components, we can see that globalization and national identity

of a nation can be proportional or inversely depending on how the nation's readiness to face. When the identity of a nation has been firmly embedded in all components of the nation, then globalization will become a necessity that can usher in the glory of the nation. This phenomenon is reinforcing

assumptions about the importance of a degree program to defend the state government through the Ministry of Defense of the Republic of Indonesia. State Defense provides unified spirit of citizen sovereignty in the face of ideological, political, economic, social and cultural threats.



## CONCLUSION

Weak commitment to the values of nationalism is precisely the strategic value as identified above, is a very serious national problem because it leads to the distortion of nationalism. We can see there are two factors, namely external factors and internal factors. External factors, such as

the impact of globalization that inspired liberalism led to the birth of capitalism in economics and liberal democracy in the political field. Internal factors are the sources from internal Indonesian people themselves. This reality arises from an error of some people in understanding the *Pancasila*. Some member of the society regard *Pancasila* cannot

solve the problem of economic crisis, social, political, cultural and even security dimension of the crisis. Therefore, it becomes necessary for state defense education that equips every citizen of Indonesia with national values in order to form tenacious and resilient nation.\*\*\*





Ironically, after 18 years of Reform Order has been run, the fact of renewal (reform) in politics and law had not showed positive tendencies in the life of state and society. On the contrary, negative tendencies had been shown and demonstrated moral decadence (social and cultural), ideological, political and law among the general public, especially in younger generation. This can be observed by increasing and more massive involvement of young people in a variety of drugs cases, corruption, terrorism, crime, and other criminal acts.

## REVITALIZATION OF STATE DEFENSE AWARENESS DEVELOPMENT & PANCASILA

By :

**Lt. Col. Drs. Sabar Simatupang, M.Si**

Academics at LP3M Defense University and Alumnus of Master of Defense Management of KSKN UI

In the midst of indications of re-radicalization (terrorism), liberalization, reinterpretation of communism ideology, moral decadence and sense of nationalism among younger generation the last few years, government once again commemorate State Defense Day on December 19. In this context, the program of State Defense Awareness Development initiated by Minister of Defense - Ryamizard Ryacudu in the beginning of 2015 then became more relevance. One of fundamental value in State Defense concept is convince of *Pancasila* as the state ideology.

### IRONY OF REFORM ORDER

Since the fall of President Soeharto in 1998 (the end of New Order era), it had emerged a tendency of irony that is counterproductive with the initial idea of Total Reform of new government. New Order government that once was considered as failed to maintain the existence of state ideology and welfare of the community eventually was being rejected of all of its political products (including State Defense Awareness Development) by the initiators of the Reform Order.

### THREATS AND IDEOLOGICAL CHALLENGES

If we map the current ideological tendency of the society mindsets and attitudes, there are some increasingly intensified threats. First, the threat of re-radicalization of basic religious values among younger generation especially university students (see various results of research conducted by LIPI, UI, Research and Training Agency of Ministry of Religious Affairs). This phenomenon was actually started to happen around the 1990s as an anti-establishment attitude



sumber: oketekno.com

towards existed religious activities (such as HMI, PMII, and others). The student activities looked flourished in state universities and become more widespread after New Order Government.

This phenomenon is clearly of concern since it can be seen in attitudes and behaviors of future generations, especially children and adolescents (primary and secondary school levels). The indication of this phenomenon and its influences can be seen from the involvement of former campus religious activists in terrorism as well as volunteers followers of ISIS, the rise of intolerant attitude among student organizations, waning of *Pancasila* ideological consciousness among some part

of students and young artists, as well as the lack of interest of students on nationalism, patriotism, or similar activities.

Secondly, neo-liberalism threat as an "anti-thesis" of *Pancasila* de-ideological trend among certain communities. The rapid progress of science and technology (modernization) beside its positive impact is also feared to give negative implications for young generation. Indications of rampant decadence (corruption, drug abuse, pornography, bullying) as a result (side-effect) of progress in information technology among the current political leadership, psychologically can be proven fatal to mindset and attitudes of our youth. The other

ideological challenge is a systemic interpretation of government/societal practices that increasingly deviated from the spirit of *Pancasila*. The most worrying discourse is some elites among party groups that continues to try to make amendment of 1945 Constitution that deviate from *Pancasila* as the state ideology.

Thirdly, although it is considered "debatable" among repellent of Soeharto regime, the tendency of return (re-ideological) Communism can be seen more visible and observable. As an alternative to negative trends of neo liberalism, Communism as ideology has emerged and had its place in some social groups. For example, political

jargon and "veiled" programs of certain mass organizations can be seen as "wrapped" in pro-democracy/human rights defense yet could be biased in "new style" Communism manifestation (show and cultural discussions that were forced to be dispersed by Polices in several places, as well as "anarchy" labor demonstration).

Fourth, although Fascism/Totalitarianism and Authoritarianism threat is not currently pose a real life condition for state and society, but it can be absorb into behavior of some political leaders of this country. (For example, the tendency of political atti-

tudes of young politicians who always want power and tugging the military to politics, as well as persecution of people by exploring interests of oligarchy). Fascism basically craves for a strong state with a single concentration of power and authoritarianism orientation is abusing military forces.

### STATE DEFENSE REVITALIZATION EFFORTS

Looking at the facts that illustrate how pervasive massive ideological threat that might get into the life of our nation and society, it is crucial for the state to "return to the ideology

of Pancasila". Ironically, since the reforms, the national curriculum has no longer present the subjects/courses of Pancasila in intact and dynamic. Intra- and extra-curricula activities program are no longer shows moral and character education based on Pancasila.

The rapid development of science and information technology as well as communication was unwittingly bringing entry to outside ideology (such as Neo Liberalism/Individualism, Atheism/No Religion, Federalism, Fascism/Totalitarianism, Neo Marxism/Socialism with several different variants) that affect ide-



alism and behavior of students. On the other hand, the appreciation of *Pancasila* ideology that has been laden with religious values, culture and morality had moved to other side by result of this progress.

The reception of some of students in religious educational environments has also being contaminated with ideological struggle to seek other alternative idealism. Such ideological challenges would present re-radicalization influences of religious values by some hard line mass organizations. On the other hand, the emergence of the debate on the concerns of the rise

or not the rise of the ideology of Communism could cause turmoil in understanding among our students.

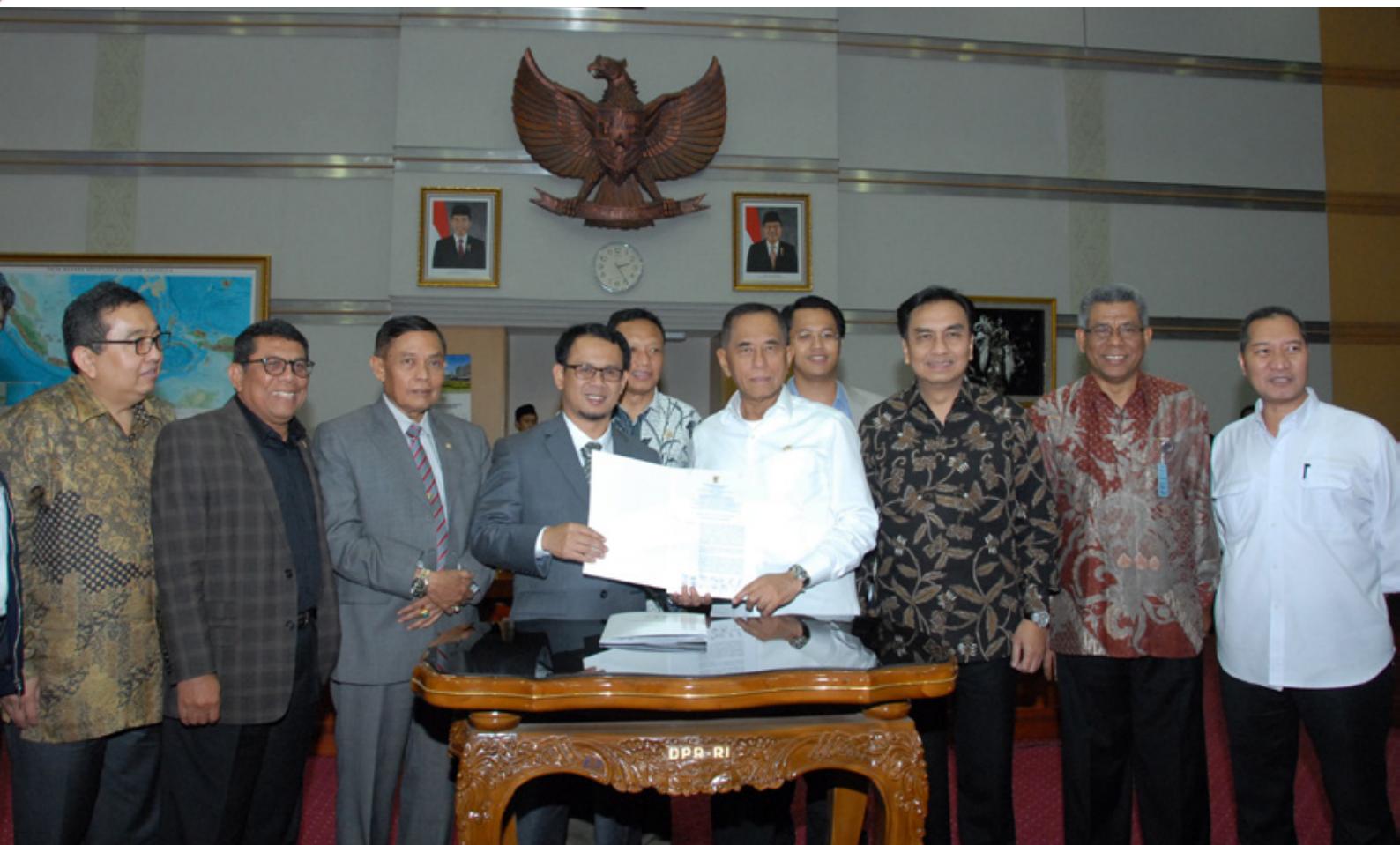
State Defense Conception adopted by Indonesia fundamentally has been referred to Constitution of the Republic of Indonesia (UUD 1945). It is stated that the spirit and State Defense efforts are vital (rights and obligations) for all Indonesian citizens (Article 27 paragraph 3 of the 1945 Constitution). State Defense conception substantially contains five (5) basic values namely Love the Country, Consciousness of Nation and State, Convince that *Pancasila* as State Ideology, Willing to Sacrifice for the State and Nation, as well as having State Defense Initial Capabilities.

In order to re-socialize the State Defense Awareness Development, it is necessary to revitalize the concept of State Defense. It should be reformulate to avoid being dogmatic or doctrinaire, yet relevant to possible ideological threats and challenges. One of the efforts to revitalize State Defense conception is the understanding of *Pancasila* as state ideology that relevant to dynamics of today's real threat. Some of the ideological threat dynamics has been vividly described above.

In order to revitalize State Defense, particularly to convince the values of *Pancasila* as state ideology, we can take sev-

eral strategic steps. First, the President and other government agencies needs to formulate appropriate legal basis for the importance of *Pancasila* as ideology and basis of nation. This effort is also in line with the plan to bring back national policy guidelines that in accordance with State Legal System and Constitution of the Republic of Indonesia (UUD 1945). Secondly, all ministries need to reformulate *Pancasila* ideology awareness training program as in accordance with their scopes of authority, duties and responsibilities. This formulation can be carried out by the Education and Training Agency and Research and Development Agency in each ministry, as well as functionally under the coordination of each coordinating ministries to be synced and elaborate with government's policies and programs. Thirdly, it is time for all stakeholders in national education in Indonesia to redefine *Pancasila* ideology reinforcement materials for the curriculum at every level of education. This formulation must be adapted to the ideological threats and challenges as well as vulnerable condition of pluralism in Indonesian society.\*\*\*





## FINANCIAL CENTER (PUSKU) OF MINISTRY OF DEFENSE

### POSITION, TASK AND FUNCTIONS

**Financial Center (Pusku).** Financial Center (Pusku) is supporting elements of tasks and functions. It is under and is responsible to the Minister through Sekjen.

Pusku is led by the Chief of Financial Center (Kapusku). It has the task of carrying out some of

the main tasks of the Ministry in financial development and administration as well as utilization of defense funding sources.

In conducting its tasks, Pusku has following functions:

1. Formulation and implementation of technical policy in defense financial;
2. Financial management including foreign aids and defense project aids;
3. Control, calibration and financial accountability research and regularization of invoice;
4. Control and evaluation of defense financial administration;

## ORGANIZATIONAL STRUCTURE

5. Development of defense financial administration services;
6. Development of functions and technical guidance in defense financial management;
7. Implementation of financial control including calibration of research and calculation of defense financial accountability
8. Management of revenues, national defense profit and loss as well as revenue reports;
9. Reconciliation of financial accounting statements and state owned defense objects accounting statements;
10. Formulation of defense financial statements; and
11. Preparation of program and budget planning, evaluation and reporting, personnel development, data and information, management and institutional arrangement, administration and internal affairs of the Center.

Pusku consists of:

1. Administration Section,
2. Financial Control and Administration Sector,
3. Financing Implementation Sector,
4. Ministry Financial Sector,
5. Functional Job Section.\*\*\*





## DATA AND INFORMATION CENTER (**PUSDATIN**) OF MINISTRY OF DEFENSE

### POSITION, TASK AND FUNCTIONS

#### Data and Information Center (*Pusdatin*).

Data and Information Center (*Pusdatin*) is supporting element of tasks and functions of the Ministry of Defense. It is under and is responsible to the Minister through the Secretary General. *Pusdatin* is led by the Chief of Data and Information Center (*Kapusdatin*).

*Pusdatin* has the task of carrying out some of the main tasks of the Ministry in development, cultivation, and technical standardization of information systems, information technology, data communication systems, coding, and organizing national defense information systems, electronic procurement services as well as operationalize cyber defense.

In conducting its tasks, *Pusdatin* has following functions:

1. Defense information systems development, formulation and implementation of technical policy in development of data, defense technology and information;
2. Formulation of standards, norms, guideline, criteria, procedures, implementation and evaluation of technical policy, defense information technology technical supervision, national defense information system opera-

tional, electronic procurement services, cyber defense operational including system application, data gathering and analysis, and data communication system;

3. Operational technical support, formulation and implementation of technical policy in development of data, defense technology and information;
4. Preparation of standards, norms, guidelines, criteria, procedures, technology, defense information, implementation and evaluation of technical policy, implementation guidance, technical supervision of defense infor-

mation technology, national defense information system operational, cyber defense operational including maintenance of computer systems and communications systems as well as information systems operational.

5. Formulation and implementation of technical policy in defense data, technology and information development, formulation of standards, norms, guideline, criteria and procedures, implementation and evaluation of technical policy, implementation of guidance and technical supervision in defense information technology, operation of national defense information

system, and national defense operational;

## ORGANIZATIONAL STRUCTURE

Pusdatin consists of:

1. Administration Section,
2. Development of Defense Information System Section,
3. Operational Support Section,
4. Information and Coding Section,
5. Functional Job Section.\*\*\*





## **PUBLIC COMMUNICATION CENTER (PUSKOMPUBLIK) OF MINISTRY OF DEFENSE**

### **POSITION, TASK AND FUNCTIONS**

#### **Public Communication Center (Puskompublik)**

is supporting element of tasks and functions of defense. It is under and is responsible to the Minister through the Sekjen. Puskompublik is led by the Chief of

Public Communication Center (Kapuskompublik). It has the task of carrying out most of the main tasks of the Ministry in information of national defense.

In conducting its tasks, Puskompublik has following functions:

1. Formulation and implementation of technical policy in

defense information and documentation;

2. Formulation of standards, norms, guidelines, criteria and procedures in news, opinions and cooperation in defense information;
3. Implementation and evaluation of technical policy in

## ORGANIZATIONAL STRUCTURE

news, opinions and cooperation in defense information;

4. Guidance, technical supervision and control in news, opinions and cooperation in defense information; and
5. Preparation of materials for program and budgeting planning, evaluation and reporting, personnel development, data and literature, management and institutional arrangement as well as administration and internal affairs of *Puskompublik*.

*Puskompublik* consists of:

1. Administration Section.
2. News Section,
3. Opinion Section,
4. Information Cooperation Section,
5. Functional Job Section.\*\*\*





## REHABILITATION CENTER (**PUSREHAB**) OF MINISTRY OF DEFENSE

### POSITION, TASK AND FUNCTIONS

#### Rehabiltation Center (*Pusrehab*)

is a supporting element of tasks and functions of defense. It is under and responsible to the Minister through the Sekjen. Rehabilitation Center is led by Chief of Rehabilitation Center (*Kapusrehab*).

*Pusrehab* has the task of carrying out some of the main tasks of the Ministry in medical rehabilitation, vocational rehabilitation, social rehabilitation and hospital care.

In conducting its tasks, *Pusrehab* has following functions:

1. Preparation of materials for formulation and implementa-

tion of technical policy in rehabilitation of disable defense personnel;

2. Of standards, norms, guidelines, criteria, and procedures in medical rehabilitation, vocational rehabilitation, social rehabilitation and hospital care;
3. Implementation and eval-

ation of technical policy in medical rehabilitation, vocational rehabilitation, social rehabilitation and hospital care;

4. Implementation guidance, technical supervision and licensing in medical rehabilitation, vocational rehabilitation, social rehabilitation and hospital care; and
5. Preparation of planning and budgeting planning materials, evaluation and reporting,

personnel development, data and literature, management and institutional arrangement as well as administration and internal affairs of the Center.

3. Vocational Rehabilitation Section,
4. Social Rehabilitation Section,
5. Functional Job Section.\*\*\*

## ORGANIZATIONAL STRUCTURE

Puskompublik consists of:

1. Administration Section,
2. Medic Rehabilitation Section,



**RAPIM KEMHAN RI TAHUN 2017**

MENINGKATKAN SEMANGAT BELA NEGARA, PROFESIONALISME TNI  
DAN KEMANDIRIAN INDUSTRI PERTAHANAN DIDUKUNG  
DENGAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG BERSIH DALAM,  
RANGKAMENJUJUDAN PERTAHANAN NEGERA YANG TANGGUH

